

DETERMINAN INFLASI (PENDEKATAN KLASIK)



TESIS

untuk memenuhi sebagian persyaratan
mencapai derajat Sarjana S-2

Program Studi
Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

Hertiana Ikasari
C4B001125

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
September
2005**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/ tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, September 2005

(Hertiana Ikasari)

TESIS
DETERMINAN INFLASI
(PENDEKATAN KLASIK)

disusun Oleh

Hertiana Ikasari
C4B001125

telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 28 September 2005
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Susunan Dewan Penguji

Pembimbing Utama

Anggota Penguji

Dr. Dwisetia Poerwono, MSc

Drs. Wiratno, MEc

Pembimbing Pendamping

Dr. FX. Sugiyanto, MS

Dr. Waridin, Ms

Firmansyah, SE, MSi

Telah dinyatakan lulus Program Studi
Magister Ilmu Ekonomi dan Studi pembangunan
Tanggal
Ketua Program Studi

Dr. Dwisetia Poerwono, MSc

ABSTRACT

The understanding about monetary transmission mechanism is very important to improve monetary policy effectiveness to achieve and maintain price stabilization and exchange rate to support economic recovery.

This study intended to examine the effects of primary money and Real Gross Domestic Product on inflation rate in Indonesia in 1998.1-2003.4. Data used in this study is secondary ones collected from Bank Indonesia (BI) and Statistical Center Bureau (BPS). The model is analyzed with Error Correction Model

The ECM results shows that in short term, reserve money (LM0) not significantly affect inflation rate, but Real Gross Domestic Product (LGDP) significantly affect inflation rate. Reserve money in prior quarter significantly affects inflation rate and Real Gross Domestic Product (LGDP) in prior quarter not significantly affect inflation rate. In long term, reserve money (LM0) not significantly affect inflation rate, but Real Gross Domestic (LGDP) significantly affect inflation rate.

ABSTRAKSI

Pemahaman mengenai mekanisme transmisi moneter sangat penting untuk meningkatkan efektivitas kebijakan moneter dalam mencapai dan menjaga kestabilan harga dan nilai tukar rupiah yang diperlukan guna mendukung proses pemulihan ekonomi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh uang primer dan Produk Domestik Bruto Riil terhadap laju inflasi di Indonesia pada tahun 1998.1-2003.4. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Bank Indonesia (BI) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Model dianalisis dengan menggunakan *Error Correction Model* (ECM).

Hasil penelitian dengan menggunakan analisis ECM menunjukkan bahwa dalam jangka pendek, variabel uang primer (LM0) tidak berpengaruh signifikan terhadap laju inflasi, sebaliknya variabel Produk Domestik Bruto Riil (LGDPR) berpengaruh signifikan terhadap laju inflasi. Variabel uang primer pada kuartal sebelumnya berpengaruh signifikan terhadap laju inflasi, sementara variabel Produk Domestik Bruto Riil pada kuartal sebelumnya tidak berpengaruh signifikan terhadap inflasi. Dalam jangka panjang variabel uang primer (LM0) tidak berpengaruh signifikan terhadap laju inflasi, sebaliknya variabel Produk Domestik Bruto Riil (LGDPR) berpengaruh signifikan terhadap laju inflasi.

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya bagi Allah SWT, karena dengan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, akhirnya penyusunan tesis ini terselesaikan. Tesis yang berjudul **Analisis Pengaruh Tingkat Suku Bunga SBI dan Uang Primer terhadap Inflasi di Indonesia Periode 1991.1-2003.2** ini, disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan tugas akhir pada Program Studi Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Diponegoro Semarang.

Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak. Untuk itu ijinkan pada kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada yang terhormat:

1. Dr. Dwisetia Poerwono, MSc selaku pembimbing utama yang disela-sela kesibukannya masih dengan sabar dan telaten memberikan arahan, masukan dan koreksi hingga selesainya penulisan tesis ini.
2. Dr. Waridin, Ms selaku pembimbing pendamping yang di sela-sela kesibukannya banyak memberikan koreksi dan masukan yang membangun.
3. Dr. FX. Sugiyanto, Ms, dan Firmansyah, SE, MSi, atas segala waktunya untuk memberikan arahan, masukan dan koreksi berkenaan dengan ekonomi moneter dan analisis ECM.
4. Ibu Erse, atas segala waktunya untuk bisa berdiskusi dengan penulis.
5. Ketua Program, Pengelola dan Para Dosen serta Karyawan Program Studi MIESP Universitas Diponegoro Semarang yang telah membantu kelancaran dalam mengikuti studi.
6. Bank Indonesia Semarang dan BPS Jawa Tengah yang telah membantu penulis berupa pemberian data dan informasi sehingga memungkinkan penulis untuk menyusun tesis ini.

7. Keluarga Pasadena: Ibu, bapak serta adikku, Luky atas segalanya yang telah diberikan kepada penulis dari dulu hingga saat ini. Mudah-mudahan penulis bisa membalasnya suatu saat nanti. Amin.
8. Keluarga Banyumanik, Bapak dan Ibu Daud serta adik-adikku: Ria, Takim, Amin, Muchlis, Muhyin dan Fadli. Penulis sungguh bersyukur menjadi salah satu bagian dari keluarga yang penuh kehangatan ini.
9. Keluarga tercinta: suami, Gafur Halim, SE dan putri kecilku, Hasna Shafry Lathifah atas kesabaran, pengertian dan motivasi tiada henti yang menjadi sumber kekuatan bagi penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
10. Teman-teman di Fakultas Ekonomi Universitas Dian Nuswantoro Semarang, tempat penulis bekerja yang senantiasa memberikan motivasi kepada penulis untuk bisa menyelesaikan tesis ini secepatnya.
11. Pihak-pihak lain, yang penulis percaya masih banyak yang berperan dan andil dalam keberhasilan penulis kali ini, sekali lagi penulis sampaikan terima kasih.

Akhirnya penulis menyadari bahwa karena keterbatasan kemampuan di pihak penulis, tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Oleh sebab itu segala kritik dan saran demi perbaikan tesis diterima penulis dengan senang hati.

Penulis tetap berharap, walau sekecil apapun semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

Semarang, September 2005

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
ABSTRACT	iv
ABSTRAKSI	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian	8
1.4. Tujuan Penelitian	8
1.5. Manfaat Hasil Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS	
2.1 Tinjauan Pustaka	10
2.1.1 Definisi Inflasi	10
2.1.2 Jenis Inflasi	11
2.1.3 Pengertian Uang	14
2.1.4 Fungsi Uang	15
2.1.5 Teori Klasik Tentang Uang	16
2.1.6 Hubungan Uang dan Kegiatan Ekonomi	20
2.1.7 Tingkat Harga dalam Model IS-LM	26
2.1.8 Instrumen Moneter	34
2.1.9 Keefektifan Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter	35
2.1.10 Penelitian Terdahulu	40

2.2 Kerangka Pemikiran Teoritis	43
2.3 Hipotesis	46
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Definisi Operasional Variabel	47
3.2 Jenis dan Sumber Data	48
3.3 Teknik Analisis	48
3.3.1 Analisis Perilaku Data	49
3.3.3.1 Uji Stasioneritas	49
3.3.3.2 Uji Kointegrasi	52
3.3.2 Model Koreksi Kesalahan (ECM)	53
3.3.4 Uji Penyimpangan Asumsi Klasik	57
3.3.5 Uji Statistik	59
BAB IV GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN MONETER, PERKEMBANGAN UANG PRIMER, PRODUK DOMESTIK BRUTO RIIL DAN LAJU INFLASI DI INDONESIA	
4.1 Tinjauan Historis Kebijakan Moneter di Indonesia	62
4.2 Perkembangan Uang Primer di Indonesia	67
4.3 Perkembangan Produk Domestik Bruto Riil di Indonesia	71
4.4 Perkembangan Laju Inflasi di Indonesia	74
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	
5.1. Analisis Perilaku Data	81
5.1 Estimasi ECM (Error Correction Model)	83
5.1.1 Hasil Estimasi ECM dalam Jangka Pendek	83
5.1.2 Hasil Estimasi ECM dalam Jangka Panjang	84
5.2 Pengujian Penyimpangan Asumsi Klasik	85
5.3 Uji Statistik	88

BAB VI Penutup

6.1 Simpulan

92

6.2 Limitasi dan Saran

92

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIODATA

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 <i>Demand Pull Inflation</i>	13
Gambar 2.2 <i>Cost Push Inflation</i>	14
Gambar 2.3 Mekanisme Transmisi Moneter menurut Moneteris	23
Gambar 2.4 Mekanisme Transmisi Moneter Menurut Keynes	25
Gambar 2.5 <i>Keynes Effect</i> dan Kurva Permintaan Agregat	27
Gambar 2.6 <i>Pigou Effect</i> dan Kurva Permintaan Agregat	29
Gambar 2.7 <i>Keynes Effect, Pigou Effect</i> dan Kurva Permintaan Agregat	31
Gambar 2.8 Bentuk Kurva Permintaan Agregatif: Asumsi Klasik Lawan Asumsi Keynes	32
Gambar 2.9 Bentuk Kurva Permintaan Agregatif dengan Adanya Jerat Likuiditas	33
Gambar 2.10 Bentuk Standar Kurva L_2 dan Kurva LM	37
Gambar 2.11 Kebijakan Fiskal	39
Gambar 2.12 Kebijakan Moneter	39
Gambar 2.13 Kerangka Model Penelitian	45

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.1	Laju Inflasi di Indonesia Tahun 1997-2004 (persen)	4
Tabel 1.2	Laju Inflasi Tujuh Negara Industri Utama, NIEs dan ASEAN Tahun 1997-2004 (Persen)	5
Tabel 4.1	Perkembangan Uang Primer Tahun 1997-2004 (Triliun Rupiah)	71
Tabel 4.2	Produk Domestik Bruto Menurut Pengeluaran Tahun 2000-2003 (Persen)	74
Tabel 4.3	Laju Inflasi Indonesia Menurut Kelompok Barang Kebutuhan Tahun 1997-2003 (Persen)	80
Tabel 5.1	Hasil Uji Akar-akar Unit	82
Tabel 5.2	Hasil Uji Derajat Integrasi Derajat Satu	82
Tabel 5.3	Hasil Uji Kointegrasi	83
Tabel 5.4	Hasil Estimasi <i>Error Correction Model</i> (ECM) Jangka Pendek	84
Tabel 5.5	Hasil Estimasi <i>Error Correction Model</i> (ECM) Jangka Panjang	85
Tabel 5.6	Pengujian Autokorelasi dengan <i>Breusch-Godfrey Test</i>	85
Tabel 5.7	Pengujian Heteroskedastisitas dengan <i>Park Test</i>	86
Tabel 5.8	Pengujian Multikolinearitas dengan <i>Examination of Partial Correlation</i>	87

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Krisis ekonomi yang dipicu oleh gejolak nilai tukar rupiah telah berdampak sangat luas pada seluruh sendi perekonomian dan tatanan kehidupan (Anwar Nasution, 2001). Krisis ekonomi yang telah terjadi, paling tidak dalam konteks ini, memberikan pelajaran yang berharga akan pentingnya penciptaan kestabilan moneter (kestabilan nilai rupiah) sebagai prasyarat bagi kelangsungan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Achyar Ilyas, 1999).

Kesadaran untuk memetik hikmah dari pengalaman itu pula yang kemudian melahirkan persetujuan DPR atas UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang mengamanatkan suatu perubahan yang sangat mendasar dalam hal pengelolaan moneter (Anwar Nasution, 2001). Undang-Undang Bank Sentral Indonesia yang baru ini, memiliki muatan substansi yang berbeda dalam hal penanganan kebijakan moneter di Indonesia dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya. Perbedaan tersebut salah satunya adalah pada sasaran akhir kebijakan moneter yang lebih diarahkan untuk menjaga inflasi (Achyar Ilyas dalam Didik J Rachbini dkk, 2000). Pemilihan inflasi sebagai sasaran akhir ini sejalan pula dengan kecenderungan perkembangan terakhir bank-bank sentral di dunia, di mana banyak bank sentral yang telah beralih lebih memfokuskan diri pada upaya pengendalian inflasi.

Inflasi merupakan fenomena ekonomi yang selalu menarik untuk dibahas terutama berkaitan dengan dampaknya yang luas terhadap agregat makro ekonomi. Pertama, inflasi domestik yang tinggi menyebabkan tingkat balas jasa riil terhadap aset finansial domestik

menjadi rendah (bahkan seringkali negatif), sehingga dapat mengganggu mobilisasi dana domestik dan bahkan dapat mengurangi tabungan domestik yang menjadi sumber dana investasi. Kedua, inflasi dapat menyebabkan daya saing barang ekspor berkurang dan dapat menimbulkan defisit dalam transaksi berjalan dan sekaligus dapat meningkatkan utang luar negeri. Ketiga, inflasi dapat memperburuk distribusi pendapatan dengan terjadinya transfer sumber daya dari konsumen dan golongan berpenghasilan tetap kepada produsen. Keempat, inflasi yang tinggi dapat mendorong terjadinya pelarian modal ke luar negeri. Kelima, inflasi yang tinggi akan dapat menyebabkan kenaikan tingkat bunga nominal yang dapat mengganggu tingkat investasi yang dibutuhkan untuk memacu tingkat pertumbuhan ekonomi tertentu (Hera Susanti dkk, 1995).

Pada tabel 1.1 dapat dilihat bahwa sejak tahun 1990-an, laju inflasi di Indonesia memang cukup tinggi, terlebih-lebih selama krisis moneter. Pada tahun 1997, tingginya tingkat inflasi Indonesia disebabkan karena terjadinya krisis moneter yang melanda beberapa negara Asia. Soedrajat Djiwandono dalam Agustinus Suryantoro (2000) menyatakan bahwa krisis nilai tukar di Thailand menyebar cepat ke negara-negara Asia lain termasuk Indonesia. Hal ini terjadi karena adanya *contagion effect* atau efek berantai sebagai akibat terintegrasinya pasar domestik ke dalam pasar keuangan global.

Inflasi.

Pada tahun 1998, laju inflasi mencapai 77,63%. Penyumbang terbesar inflasi ini adalah inflasi makanan yang mencapai 99,4%. Hal ini menunjukkan adanya gangguan pada jalur distribusi makanan pada sisi penawaran di samping di sisi permintaan sebagai pendorong utamanya adalah *imported inflation*, di mana nilai tukar yang semakin terpuruk membawa akibat semakin mahalnya harga makanan yang harus diimpor.

Selanjutnya pada tahun 1999, laju inflasi yang diukur dari perubahan IHK turun menjadi sebesar 2,01% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 77,63%. Rendahnya inflasi pada tahun 1999 disebabkan oleh perbaikan sisi penawaran jangka pendek dan sumbangan yang besar dari penurunan laju inflasi inti. Tekanan-tekanan laju inflasi hanya meningkat pada triwulan pertama dan keempat tahun laporan, yang timbul berkaitan dengan meningkatnya permintaan masyarakat dalam menghadapi perayaan hari-hari besar keagamaan.

Sementara itu, perkembangan harga-harga selama tahun 2000 mendapat tekanan yang berat sejalan dengan meningkatnya kegiatan ekonomi, adanya kebijakan pemerintah di bidang harga dan pendapatan, melemahnya nilai tukar rupiah dan meningkatnya ekspektasi inflasi. Berbagai faktor tersebut telah menyebabkan laju inflasi IHK tahun 2000 mencapai 9,35% lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 2,01%.

Selanjutnya harga-harga barang dan jasa selama 2001 mengalami tekanan yang lebih berat dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini tercermin dari inflasi IHK yang mencapai 12,55%, lebih tinggi dibandingkan inflasi IHK 2000 sebesar 9,35%. Tekanan inflasi pada tahun 2001 diperkirakan berasal dari dampak kebijakan pemerintah di bidang harga dan pendapatan, meningkatnya sisi permintaan agregat, dan ekspektasi inflasi masyarakat yang terkait dengan dampak kebijakan pemerintah tersebut.

Inflasi pada 2002 tercatat sebesar 10,03%, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 12,55%. Penurunan ini seiring dengan menguatnya nilai tukar dan membaiknya ekspektasi inflasi masyarakat, sedangkan permintaan belum memberikan tekanan yang signifikan..

Inflasi IHK 2003 mengalami penurunan seiring dengan menguatnya nilai tukar dan

membbaiknya ekspektasi inflasi masyarakat. Dilihat dari indikator IHK, perkembangan inflasi 2003 tercatat sebesar 5,06%, menurun tajam dibandingkan 2002 (10,03%). Penurunan ini terutama bersumber dari penurunan harga di kelompok bahan makanan dan lebih rendahnya peningkatan harga hampir di seluruh kelompok barang.

Tabel 1.1
Laju Inflasi di Indonesia
Tahun 1997-2004 (persen)

Tahun	%
1997	11,05
1998	77,63
1999	2,01
2000	9,35
2001	12,55
2002	10,03
2003	5,06
2004	6,40

*Sumber: Bank Indonesia, Statistik
Ekonomi dan Keuangan
Indonesia, 1997-2004*

Pada tabel 1.2, sampai dengan tahun 2004, terlihat bahwa tujuh negara industri utama dan negara industri baru Asia (NIEs) mempunyai laju inflasi yang rendah. Sementara di negara ASEAN yang paling tinggi laju inflasinya adalah Indonesia.

Dari uraian mengenai penyebab tingginya tingkat inflasi di Indonesia di atas, diketahui bahwa inflasi merupakan *outcome* dari interaksi antara permintaan agregat dan penawaran agregat. Terjadinya ketimpangan antara permintaan agregat dan penawaran agregat tentunya akan mempengaruhi inflasi.

Tabel 1.2
Laju Inflasi Tujuh Negara Industri Utama,
NIEs dan ASEAN Tahun 1997-2004 (Persen)

Kelompok Negara	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Tujuh Negara Industri Utama	1,70	1,60	2,70	3,40	1,60	1,10	1,9	3,3
- Amerika Serikat	1,80	0,60	-1,10	-0,20	1,20	-0,70	-0,4	0,2
- Jepang	1,50	0,60	0,70	2,10	1,70	0,80	1,1	2,1
- Jerman	2,80	2,70	2,30	2,10	0,70	1,00	1,3	1,6
- Inggris	1,90	1,90	2,00	1,70	2,40	2,20	2,5	2,0
- Italia	1,30	0,70	0,60	1,80	1,40	1,40	2,2	2,1
- Perancis	2,30	2,40	1,30	2,40	0,70	1,30	2,0	2,1
- Kanada								
NIEs	4,40	7,50	0,80	2,20	3,20	2,60	3,4	3,0
- Korea Selatan	5,70	2,60	-4,00	-3,70	-1,20	3,30	-1,9	0,2
- Hong Kong	0,90	1,70	0,20	1,30	-1,70	0,10	-0,1	1,6
- Taiwan	2,00	-0,30	0,10	1,40	-0,60	0,10	0,7	1,5
- Singapura								
ASEAN	11,05	77,63	2,01	9,35	12,55	10,03	5,10	6,40
- Indonesia	3,90	5,30	2,80	1,50	1,20	2,10	1,2	2,1
- Malaysia	7,00	8,10	0,30	1,50	-0,60	0,20	1,8	2,9
- Thailand	7,00	9,70	6,60	4,30	3,90	3,00	3,1	7,9
- Philipina								

Sumber: Bank Indonesia, Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia, 1997-2004

Dapat disimpulkan bahwa secara garis besar gejala peningkatan harga secara permanen dapat dijelaskan dari sisi permintaan (*demand-pull inflation*) maupun dari sisi penawaran (*cost push inflation*). *Cost-push inflation* disebabkan oleh biaya produksi yang tinggi sehingga pada gilirannya akan menyebabkan penawaran agregat akan rendah. Sedangkan *demand-pull inflation* disebabkan karena jumlah atau laju pertumbuhan permintaan agregat lebih tinggi daripada jumlah atau laju pertumbuhan penawaran agregat.

Aspek moneter, yang dalam hal ini lebih dapat dikendalikan oleh Bank Indonesia, ternyata hanya mempengaruhi sisi permintaan agregat. Sementara penawaran agregat

lebih banyak dipengaruhi oleh kondisi sektor riil yang terjadi seperti kondisi musim yang mempengaruhi produksi komoditi pertanian, kondisi distribusi barang dan sebagainya (Syahril Sabirin, 2002).

Penempatan inflasi sebagai sasaran akhir, tidak berarti Bank Indonesia mengabaikan sasaran makro ekonomi lainnya, seperti pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja. Justru pengendalian inflasi tersebut dimaksudkan untuk dapat mencapai pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja pada tingkat kapasitas penuh. Disamping itu, mengingat adanya *trade-off* jangka pendek antara inflasi dan pertumbuhan, mentargetkan inflasi secara otomatis identik dengan mentargetkan pertumbuhan, dengan kata lain, dalam menetapkan target inflasi, Bank Indonesia sudah mempertimbangkan seberapa tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi yang akan dicapai dengan tingkat inflasi tersebut.

Dalam perjalanannya, apabila tingkat inflasi berhasil dikendalikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, maka kredibilitas bank sentral akan terbentuk di masyarakat. Dengan kredibilitas tersebut, ekspektasi inflasi masyarakat dengan mudah akan terbentuk sesuai dengan target inflasi yang ditetapkan Bank Indonesia, dan sekaligus target tersebut akan menjadi *nominal anchor* bagi para pelaku ekonomi. Dalam kondisi ekpektasi inflasi sama dengan aktual inflasi, setiap pelaku ekonomi dapat merencanakan kegiatannya dengan baik sehingga tidak perlu terjadi kelebihan produksi ataupun kekurangan persediaan (*unintended inventory*), yang berarti ekonomi dan lapangan kerja tumbuh pada tingkat kapasitas penuh (Achjar Ilyas dalam Didik J Rachbini dkk, 2000).

Mishkin (2001) menyatakan bahwa bank sentral dalam melakukan implementasi kebijakan moneter untuk mencapai tujuan akhir kebijakan moneter yang diharapkan,

tidak bisa secara langsung. Hal ini tentu sejalan dengan sifat kebijakan moneter di mana membutuhkan *time-lag* antara aksi dari penetapan kebijakan hingga mencapai hasil dari penetapan kebijakan tersebut. Kebanyakan ekonom berpendapat bahwa jarak waktu (*lag*) antara tindakan kebijakan moneter dengan pengaruhnya pada inflasi adalah panjang, sehingga akan sangat terlambat seandainya terjadi kesalahan kebijakan, dan kebijakan hanya bisa diubah setelah hasil akhir tersebut telah terjadi atau telah bisa diamati (Boediono, 2001).

Apabila kebijakan moneter dijalankan, ia menimbulkan beberapa rangkaian perubahan-perubahan dalam perekonomian yang pada akhirnya menyebabkan perubahan dalam pendapatan nasional dan penggunaan tenaga kerja. Rangkaian perubahan-perubahan yang berlaku itu dinamakan mekanisme transmisi (Sadono Sukirno, 2000).

Perdebatan mengenai mekanisme transmisi kebijakan moneter sudah berlangsung sejak lama antara aliran Klasik dan Keynes. Menurut Keynes, proses bekerjanya pengaruh gejala moneter terhadap perekonomian dapat dibagi dalam tiga bagian, yaitu: *pertama*, mekanisme penyesuaian di sektor moneter, *kedua*, mekanisme pemindahan gejala ekonomi dari sektor moneter ke sektor riil, dan *ketiga*, mekanisme penyesuaian yang terjadi di sektor riil. Sehingga, mekanisme transmisi yang dipakai teori Keynes adalah mekanisme transmisi tidak langsung (Soediyono, 2000).

Sebaliknya, teori kuantitas uang dari aliran Klasik menganut mekanisme transmisi yang langsung (*direct transmission mechanism*). Di dalam menerangkan mengenai teori kuantitas uang yang dilakukan Irving Fisher, digunakan persamaan aljabar yang dinamakan persamaan pertukaran (*The Equation of Exchange*), di mana $MV = PT$.

Bagi Indonesia sendiri, pemahaman mengenai mekanisme transmisi moneter sangat penting untuk meningkatkan efektivitas kebijakan moneter dalam mencapai dan menjaga

kestabilan harga dan nilai tukar rupiah yang diperlukan guna mendukung proses pemulihan ekonomi.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama adalah adanya laju inflasi yang relatif tinggi di Indonesia terlebih-lebih selama krisis moneter. Pembahasan dalam tesis ini lebih difokuskan pada faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi dari sisi permintaan (*demand side*) dengan pendekatan Klasik. Diharapkan dengan sisi permintaan yang terkendali, maka hal tersebut secara otomatis akan mempengaruhi sisi penawaran. Adapun pendekatan Klasik digunakan karena selama ini transmisi melalui saluran uang telah sejak lama dijadikan dasar kebijakan moneter di Indonesia, termasuk selama Indonesia berada dalam program IMF dari tahun 1997 hingga tahun 2003 yang lalu. Mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui saluran uang (*money channel*) mengacu pada dominasi peranan uang dalam perekonomian dengan persamaan: $MV = PT$, yang pertama kali dijelaskan oleh teori kuantitas uang dari aliran Klasik.

Selanjutnya yang menjadi pertanyaan pada penelitian ini adalah bagaimana pengaruh uang primer, dan Produk Domestik Bruto Riil terhadap laju inflasi di Indonesia pada tahun 1998.1 sampai dengan 2003.4 ?

1.3. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini diadakan dengan tujuan:

1. Menganalisis pengaruh uang primer terhadap laju inflasi di Indonesia pada tahun 1998.1 sampai dengan 2003.4

2. Menganalisis pengaruh Produk Domestik Bruto Riil terhadap laju inflasi di Indonesia pada tahun 1998.1 sampai dengan 2003.4

1.3.2. Manfaat Hasil Penelitian

Manfaat hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai masukan bagi Bank Indonesia agar dapat melakukan respon kebijakan yang tepat sasaran dan tidak menimbulkan gejolak yang tidak diinginkan dalam mengendalikan laju inflasi.
2. Sebagai bahan informasi atau studi perbandingan untuk penelitian-penelitian sejenis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Definisi Inflasi

Ada cukup banyak definisi mengenai inflasi. Sejak awal 1970-an para ahli ekonomi mengartikannya sebagai naiknya tingkat harga umum secara terus menerus. Venieris dan Sebold dalam Anton Hermanto Gunawan (1991), mendefinisikan inflasi sebagai kecenderungan yang terus menerus dari tingkat harga umum untuk meningkat setiap waktu. Kenaikan harga umum yang terjadi sekali waktu saja, menurut definisi ini, tidak dapat dikatakan sebagai inflasi. Sedangkan menurut Ackley dalam Iswardono (1993), inflasi adalah suatu kenaikan harga yang terus menerus dari barang-barang dan jasa secara umum (bukan satu macam barang saja dan sesaat). Menurut definisi ini kenaikan harga yang sporadis bukan dikatakan sebagai inflasi.

Sehingga menurut Venieris dan Sebold dalam Anton Hermanto Gunawan (1991) di dalam definisi inflasi tersebut tercakup tiga aspek, yaitu:

1. Adanya “kecenderungan” (*tendency*) harga-harga untuk meningkat, yang berarti mungkin saja tingkat harga yang terjadi aktual pada waktu tertentu turun atau naik dibandingkan dengan sebelumnya, tetapi tetap menunjukkan kecenderungan yang meningkat
2. Peningkatan harga tersebut berlangsung “terus menerus” (*sustained*) yang berarti bukan terjadi pada suatu waktu saja, yakni akibat adanya kenaikan harga bahan bakar minyak pada awal tahun saja misalnya.

3. Mencakup pengertian “tingkat harga umum” (*general level of prices*), yang berarti tingkat harga yang meningkat bukan hanya pada satu atau beberapa komoditi saja.

2.1.2. Jenis Inflasi

2.1.2.1. Jenis Inflasi Menurut Sifatnya

Jenis inflasi menurut sifatnya dibagi menjadi (Nopirin, 1992):

- a. Inflasi merayap (*creeping inflation*)

Ditandai dengan laju inflasi yang rendah (kurang dari 10% per tahun). Kenaikan harga berjalan secara lambat, dengan persentase yang kecil serta dalam jangka yang relatif lama.

- b. Inflasi menengah (*galloping inflation*)

Ditandai dengan kenaikan harga yang cukup besar, (biasanya *double digit* atau bahkan *triple digit*) dan kadangkala berjalan dalam waktu yang relatif pendek serta mempunyai sifat akselerasi. Artinya, harga-harga minggu/ bulan ini lebih tinggi dari minggu/ bulan lalu dan seterusnya. Efeknya terhadap perekonomian lebih berat daripada inflasi yang merayap (*creeping inflation*).

- c. Inflasi tinggi (*hyper inflation*)

Merupakan inflasi yang paling parah akibatnya. Harga-harga naik sampai lima atau enam kali. Masyarakat tidak lagi berkeinginan untuk menyimpan uang. Nilai uang merosot dengan tajam, sehingga ingin ditukarkan dengan barang. Perputaran uang makin cepat, harga naik secara akselerasi. Biasanya keadaan ini timbul apabila pemerintah mengalami defisit anggaran belanja (misalnya ditimbulkan oleh adanya perang) yang dibelanjai/ ditutup dengan mencetak uang.

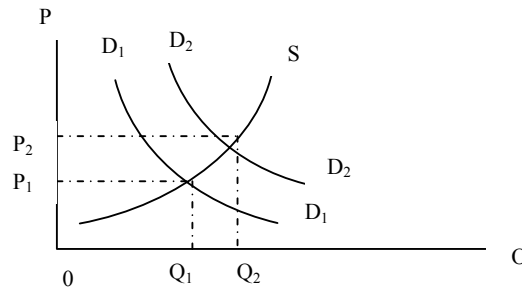
2.1.2.2. Jenis Inflasi Menurut Sebab Terjadinya

Jenis inflasi menurut sebab terjadinya dibagi menjadi (Dernburg, 1994):

a. *Demand Pull Inflation*

Sebagaimana dalam gambar 2.1, anggaplah perekonomian dimulai pada suatu tingkat harga mula-mula, P_1 , dan tingkat *output* riil, O_1 , di mana (P_1, O_1) berada pada perpotongan antara kurva permintaan dan penawaran, masing-masing D_1D_1 dan SS . Sekarang anggaplah bahwa kurva permintaan agregat bergeser keluar ke D_2D_2 . Pergeseran seperti itu dapat berasal dari berbagai faktor, seperti perluasan pengeluaran pemerintah yang disebabkan perang atau pergeseran keluar pada fungsi konsumsi atau investasi dari sektor swasta. Sebagaimana ditunjukkan gambar 2.1, apapun sumbernya, pergeseran kurva permintaan agregat menaikkan tingkat *output* riil (dari O_1 ke O_2) dan tingkat harga (dari P_1 ke P_2). Maka ini memberikan contoh tentang apa yang disebut inflasi tarikan permintaan (*demand pull inflation*), yaitu situasi di mana pergeseran kurva permintaan “menarik ke atas” tingkat harga dan menyebabkan inflasi. Tentu saja, besar inflasi yang sebenarnya akan tergantung pada sejauh mana kurva permintaan bergeser dan pada bentuk kurva penawaran. Jika kurva penawaran adalah curam, karena mungkin mendekati penggunaan tenaga kerja penuh, akan terdapat kenaikan harga yang lebih besar dan tanggapan *output* riil yang lebih kecil daripada jika kurva penawaran kurang curam

Gambar 2.1
Demand Pull Inflation



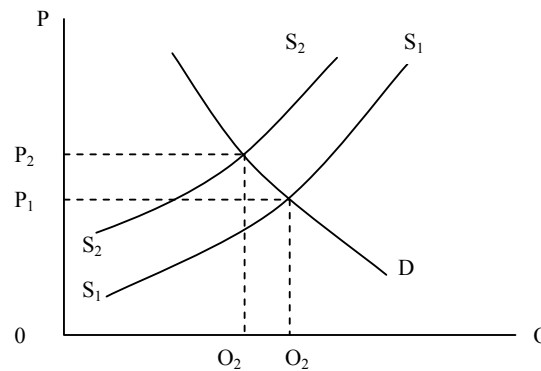
Sumber: Dernburg, Makro Ekonomi: Konsep, Teori dan Kebijakan, 1994

b. *Cost Push Inflation*

Walaupun pergeseran permintaan agregat dapat menciptakan inflasi, namun inflasi mungkin pula timbul sekalipun kurva permintaan tetap. Hal ini dapat terjadi jika kurva penawaran agregat bergeser ke atas ke sebelah kiri, sebagaimana diperlihatkan dalam gambar 2.2. Karena kita berpendapat bahwa di dalam kondisi yang “normal”, sepanjang waktu kurva penawaran bergeser ke bawah dan ke sebelah kanan, bagaimana pergeseran yang terbalik seperti itu dapat terjadi? Sayangnya, sebagaimana sejarah memperlihatkan, ada banyak sekali cara. Pada dasarnya, setiap perkembangan yang membatasi penawaran atau mendorong harga naik secara otonom akan menyebabkan penawaran bergeser ke atas. Peristiwa-peristiwa dalam praktek yang telah menghasilkan pergeseran seperti itu termasuk kegagalan panen, kenaikan harga minyak otonom yang ditimbulkan oleh OPEC, dan turunnya produktivitas.

Pengaruh pergeseran penawaran yang sebaliknya, telah dilukiskan dalam gambar 2.2. Karena kurva penawaran bergeser dari S_1 ke S_2 , harga tentu saja naik, yang kadang-kadang disebut inflasi dorongan biaya (*cost push inflation*).

Gambar 2.2
Cost Push Inflation



Sumber: Dernburg, Makro Ekonomi: Konsep, Teori dan Kebijakan, 1994

2.1.2.3. Jenis Inflasi Menurut Asal Dari Inflasi

Jenis inflasi menurut asal dari inflasi dibagi menjadi (Boediono, 1985):

a. Inflasi yang berasal dari dalam negeri (*domestic inflation*)

Inflasi yang berasal dari dalam negeri timbul misalnya karena defisit anggaran belanja yang dibiayai dengan pencetakan uang baru, panen gagal dan sebagainya.

b. Inflasi yang berasal dari luar negeri (*imported inflation*)

Penularan inflasi dari luar negeri ke dalam negeri ini dapat mudah terjadi pada negara-negara yang perekonomiannya terbuka. Penularan inflasi ini dapat terjadi melalui kenaikan harga-harga baik itu impor maupun ekspor baik secara *demand inflation* maupun *cost inflation*.

2.1.3. Pengertian Uang

Uang adalah benda-benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar menukar perdagangan (Sadono Sukirno, 2000).

Teddy Herlambang dkk (2000) menyatakan bahwa definisi uang di Indonesia

terdiri dari dua bagian, yaitu semua uang kartal (uang kertas dan uang logam seperti yang dikenal masyarakat sehari-hari) dan uang giral (saldo-saldo rekening bank yang sewaktu-waktu dapat dipakai untuk pembayaran melalui cek, giro atau surat perintah lainnya). Uang kartal dan uang giral ini dalam istilah moneter disebut M1 atau disebut sebagai uang beredar dalam arti sempit. Penjelasan di atas dapat dirangkum melalui persamaan berikut:

$$M_1 = \text{Uang kartal} + \text{Uang giral}$$

Disamping uang beredar dalam arti sempit, juga terdapat uang beredar dalam arti luas (M_2) yang disebut juga sebagai likuiditas perekonomian. M_2 merupakan penjumlahan dari M1 dan Uang kuasi (*Quasy Money*). Uang kuasi adalah uang yang tidak diedarkan. Uang kuasi ini terdiri atas deposito berjangka, tabungan dan rekening valuta asing milik swasta domestik. Penjelasan di atas dapat dirangkum melalui persamaan berikut:

$$M_2 = M_1 + QM$$

Pengertian lain tentang uang yang perlu juga dipahami adalah uang primer (*reserve money/ M_0*), yaitu uang yang diartikan sebagai uang yang diedarkan pemerintah yang dipegang oleh masyarakat dan bank-bank. Uang primer ini meliputi uang yang dipegang masyarakat sebagai alat bayar sehari-hari (uang kartal) dan uang serap yang dimiliki bank (uang tunai di bank dan deposito di BI). Penjelasan di atas dapat dirangkum melalui persamaan berikut:

$$M_0 = \text{Uang kartal} + \text{uang serap}$$

2.1.4. Fungsi uang

Secara prinsip uang memiliki 3 fungsi yang melekat sebagai kesatuan yaitu (Tedy Herlambang, dkk, 2000):

1. Penyimpan Nilai (*Store of Value*)

Uang disini berfungsi sebagai sarana transfer daya beli dari waktu sekarang untuk besok. Orang bekerja dan memperoleh pendapatan dalam bentuk uang yang dapat dipergunakan untuk konsumsi sekarang atau besok. Dengan demikian disini uang berfungsi sebagai penyimpan nilai pekerjaannya.

2. Unit Hitung (*A Unit of Account*)

Uang dipergunakan untuk istilah 'harga'. Misalkan saja dua barang memiliki harga relatif maka harga relatif tersebut dihitung dalam satuan uang.

3. Alat Tukar (*Medium of Exchange*)

Uang dipakai sebagai alat untuk membeli barang dan jasa. Jika kita mempergunakan cara barter maka diperlukan dua kepentingan yang sama (*double coincidence of wants*) yang mungkin sulit dipertemukan dalam satu waktu yang sama.

2.1.5. Teori Klasik tentang Uang

2.1.5.1 Teori Kuantitas Uang Tradisional

Teori kuantitas uang merupakan salah satu doktrin ekonomi yang sangat tua yang masih dapat bertahan sampai saat ini. Teori uang lahir pada masa jauh sebelum bapak ilmu ekonomi, Adam Smith lahir. Perumusan teori kuantitas uang yang oleh kebanyakan ahli ekonomi dianggap sebagai perumusan yang tertua ialah perumusan yang terdapat pada tulisan Jean Bodin yang ditulisnya pada abad ke 16 (Soediyono, 2000).

Pada dasarnya, teori kuantitas uang merupakan suatu hipotesis mengenai penyebab utama nilai uang atau tingkat harga. Teori ini menghasilkan kesimpulan bahwa perubahan nilai uang atau tingkat harga terutama merupakan akibat daripada adanya perubahan jumlah uang beredar. Tidak berbeda dengan benda-benda ekonomi lainnya,

bertambahnya jumlah uang yang beredar dalam masyarakat akan mengakibatkan nilai mata uang itu sendiri menurun. Oleh karena menurunnya nilai uang mempunyai makna yang sama dengan naiknya tingkat harga, maka kesimpulan teoritik yang dihasilkan oleh teori kuantitas uang seperti diungkapkan di atas, biasa juga diungkapkan: bertambah (atau berkurangnya) jumlah uang yang beredar mempunyai tendensi mengakibatkan naiknya atau turunnya tingkat harga (Soediyono, 2000).

Doktrin kuantitas uang yang lahir di abad ke 16 tersebut dari generasi ke generasi mengalami perkembangan, modifikasi serta variasi-variasi, sehingga semakin sukar bagi kita untuk mengetahui batasan-batasannya. Pada tahun 1974, Thomas M. Humphrey mencoba memperjelas garis yang membatasi teori kuantitas uang dari teori-teori lainnya dengan menunjukkan bahwa teori kuantitas uang menggunakan lima postulat pokok, yaitu:

1. Postulat proporsionalitas antara M (yaitu jumlah uang yang beredar) dengan H (yaitu tingkat harga)
2. Postulat peranan aktif daripada M dalam mekanisme transmisi moneter
3. Postulat kenetralan uang, yang biasa juga disebut adanya *dichotomy* atau terpisahnya sektor riil dari sektor moneter.
4. Postulat teori moneter tingkat harga, di mana yang dimaksud ialah bahwa penyebab utama perubahan tingkat harga ialah gejala-gejala yang terjadi dalam sektor moneter
5. Postulat eksogenitas jumlah uang yang beredar dalam arti bahwa M diasumsikan merupakan variabel yang eksogen

Teori kuantitas uang tradisional yang umurnya telah mencapai empat abad tersebut, mempunyai beberapa versi. Beberapa di antaranya yang sangat terkenal ialah:

1. Persamaan Pertukaran

2. Persamaan Cambridge Versi Saldo Kas
3. Persamaan Cambridge Versi Pendapatan

Persamaan Pertukaran atau *Equation of Exchange* merupakan pengungkapan teori kuantitas uang hasil pemikiran seorang pemikir ekonomi Amerika Serikat, Irving Fisher (1867-1947). Adapun bentuk persamaannya adalah sebagai berikut (Soediyono, 2000):

$$MV = PT$$

Di mana:

- M = jumlah uang yang beredar dalam perekonomian
- V = kecepatan perputaran uang atau *Velocity Circulation of Money*
- P = tingkat harga (*Price level*)
- T = banyaknya transaksi per satuan waktu

Persamaan kedua dan ketiga merupakan hasil pemikiran A.C Pigou (1877-1959), seorang guru besar Perguruan Tinggi Cambridge. Hingga mudahlah difahami apabila persamaan yang dihasilkannya disebut *Cambridge Equation*. Seperti disebutkan di atas *Cambridge Equation* mengenal dua versi:

- a. *Cash Balance Version*:

$$M = kPT$$

- b. *Income Version*:

$$M = kPQ = ky$$

Di mana variabel-variabel yang baru:

- Q = *output nasional*
- y = pendapatan nasional nominal = PQ
- K = angka pecahan yang menunjukkan bagian daripada PT (= nilai transaksi penjualan per tahun) atau bagian daripada PQ atau y yang masyarakat ingin

memegang atau menyimpannya dalam bentuk uang.

2.1.5.2. Mekanisme Transmisi Teori Kuantitas Uang Tradisional

Secara garis besar, teori kuantitas uang tradisional menganut *direct transmission mechanism* yang disebut juga mekanisme transmisi langsung. Selanjutnya teori kuantitas uang modern mengambil sikap melanjutkan penggunaan mekanisme transmisi langsung tersebut (Soediyono, 2000).

Mekanisme transmisi yang langsung menurut teori kuantitas uang tradisional bekerjanya adalah sebagai berikut, misalkan mula-mula perekonomian berada dalam keadaan *ekuilibrium*. Ini berarti bahwa jumlah uang yang beredar tepat sebesar jumlah uang yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan pendapatan nasional yang terjadi. Dengan menggunakan *Cambridge Equation*, keadaan *ekuilibrium* yang dimaksud dapat diungkapkan dalam bentuk persamaan (Soediyono, 2000):

$$\bar{M}^S = M^D = kPT$$

$$\bar{M}^S = MD = kPQ = ky$$

Apabila suatu ketika terjadi peningkatan jumlah uang yang beredar (yaitu dengan perkataan lain nilai M^S , *money supply*, naik), maka terjadilah *disequilibrium*. Oleh karena M^S sekarang lebih besar daripada M^D , ini berarti bahwa jumlah uang yang dimiliki oleh rumah tangga-rumah tangga atau oleh individu-individu melebihi jumlah uang yang mereka inginkan. Keadaan seperti ini mendorong mereka untuk memperbesar pengeluaran konsumsi mereka, oleh karena dengan cara demikian saldo kas mereka menurun mendekati ke jumlah yang mereka inginkan. Kalau demikian, maka ini berarti nilai PT, nilai PQ atau nilai y meningkat. Meningkatnya nilai y (yang berarti juga nilai PQ meningkat) atau meningkatnya nilai PT, mempunyai tendensi menimbulkan

pertanyaan: Apakah meningkatnya nilai-nilai tersebut terjadi hanya karena meningkatnya nilai P saja ataukah T atau Q saja, ataukah merupakan kombinasi peningkatan nilai P dengan peningkatan nilai T atau nilai Q. Terhadap pertanyaan ini, dengan menggunakan ungkapan-ungkapan Irving Fisher, jawaban yang diberikan adalah (Soediyono, 2000):

1. Untuk masa transisi atau *transition period*, nilai T (atau nilai Q kalau yang kita pakai *Cambridge Equation*) dapat mengalami perubahan. Sehingga dengan demikian meningkatnya nilai PT atau PQ dalam masa transisi dapat merupakan kombinasi peningkatan nilai P yang disertai pula oleh perubahan nilai T atau nilai Q. Ini mempunyai makna bahwa dalam masa transisi postulat proposionalitas tidak berlaku.
2. Apabila perekonomian telah mencapai keadaan *ekuilibrium* jangka panjang kembali, perekonomian akan berada dalam keadaan *full-employment*. Dengan mendasarkan kepada asumsi *ceteris paribus*, ini mempunyai makna bahwa baik T maupun Q akan kembali ke nilai *ekuilibrium* jangka panjang yang sebelumnya. Ini membawa konsekuensi bahwa untuk jangka panjang, yaitu setelah periode transisi terlampaui, tingkat harga akan meningkat atau menurun searah dan proporsional dengan peningkatan atau penurunan jumlah uang yang beredar.

2.1.6. Hubungan Uang dan Kegiatan Ekonomi

2.1.6.1. Pandangan Moneteris

Kegagalan teori Keynes dalam memecahkan masalah stagnasi yang dihadapi dunia setelah tahun 1970-an telah melahirkan suatu aliran baru yang disebut "aliran Moneteris". Aliran ini mengutamakan kebijakan moneter dalam mengatasi kemelut ekonomi pada saat itu.



Istilah "Moneteris" ini pertama kali digunakan oleh Karl Bruner untuk menggambarkan berbagai studi di bidang ekonomi moneter dan kebijaksanaan moneter.

Dalam artikelnya "*The role of Money and Monetary Policy*", aliran Monetaris pada prinsipnya menekankan bahwa perkembangan moneter merupakan unsur penting dalam perkembangan produksi, kesempatan kerja dan harga-harga. Pertumbuhan jumlah uang beredar merupakan unsur yang paling dapat diandalkan dalam perkembangan moneter dan bahwa perilaku otoritas moneter menentukan jumlah uang beredar.

Kelompok Monetaris berasumsi bahwa mekanisme pasar di dalam perekonomian dapat berjalan secara otomatis sehingga harga-harga dapat segera menyesuaikan (naik atau turun) apabila terjadi perbedaan (lebih besar atau lebih kecil) antara permintaan dan penawaran di pasar.

Kelompok Monetaris berpendapat bahwa uang hanya berpengaruh pada tingkat inflasi dan tidak pada pertumbuhan ekonomi. Implikasinya adalah bahwa kebijakan moneter harus diarahkan hanya untuk pengendalian inflasi dan tidak bisa dipergunakan untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi riil. Lebih lanjut lagi, pelaksanaan kebijakan moneter tersebut perlu dilakukan dengan *rules* yang dibakukan dan diarahkan untuk mengendalikan inflasi. Kebijakan moneter tidak dapat dipergunakan secara aktif mempengaruhi kegiatan ekonomi riil, dalam arti dapat dilonggarkan apabila sektor riil sedang lesu dan diketatkan apabila terjadi peningkatan kegiatan ekonomi secara berlebihan.

Tokoh aliran Monetaris, yaitu Milton Friedman menekankan bahwa perilaku dalam pertumbuhan jumlah uang beredar sangat mempengaruhi aktivitas-aktivitas ekonomi. Stok jumlah uang beredar sangat mempengaruhi aktivitas-aktivitas ekonomi. Stok jumlah uang beredar dalam perekonomian akan menentukan laju inflasi dalam jangka panjang.

Friedman menjelaskan mengenai adanya keterkaitan antara perubahan dalam jumlah uang beredar dengan perubahan tingkat aktivitas ekonomi. Fluktuasi ekonomi yang

terjadi menurut pandangan Friedman lebih disebabkan oleh perubahan jumlah uang beredar, dan yakin bahwa gangguan moneter merupakan faktor penting yang menyebabkan perubahan-perubahan dalam tingkat aktivitas ekonomi. Ketidakstabilan laju pertumbuhan jumlah uang beredar akan tercermin pada berbagai aktivitas ekonomi.

Friedman berpendapat bahwa pemerintah perlu memperhatikan naik turunnya laju pertumbuhan jumlah uang beredar. Karena pergerakan laju pertumbuhan uang beredar mempunyai pengaruh penting terhadap jalannya perekonomian di masa depan. Laju pertumbuhan uang beredar yang tidak menentu akan menghasilkan laju pertumbuhan ekonomi yang tidak menentu pula. Secara umum laju pertumbuhan jumlah uang beredar yang tinggi akan menyebabkan terjadinya *boom* inflasi. Sedangkan laju pertumbuhan jumlah uang beredar yang rendah akan mendorong terjadinya resesi. Friedman menyarankan agar jumlah uang beredar tidak boleh bertambah cepat dari seharusnya. Pedoman moneter yang dianjurkan Friedman untuk mengatasi hal ini adalah bahwa jumlah uang beredar ditambah setiap tahunnya sebesar laju pertumbuhan ekonomi.

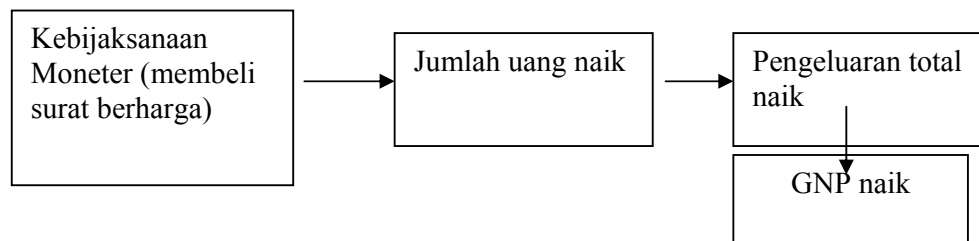
Hubungan langsung antara kebijakan moneter (jumlah uang beredar) dan tingkat pendapatan nasional sekaligus tingkat kenaikan harga menurut Moneteris dapat dilihat dari teori kuantitas uang (klasik) yang berasal dari persamaan kuantitas ($MV=PT$). Jika laju peredaran uang dapat diramalkan, maka dapat diramalkan pula jumlah uang beredar. Namun jika diasumsikan laju peredaran uang adalah konstan (stabil) dalam jangka waktu tertentu yang tergantung pada faktor kelembagaan keuangan, metode pembayaran masyarakat, tingkat moneterisasi masyarakat serta penggunaan alat-alat pembayaran dalam masyarakat, maka berdasarkan *equilibrium of exchange*, maka perubahan dalam jumlah uang beredar akan proporsional dengan perubahan pada tingkat pendapatan nasional. Persamaan kuantitas di atas dapat pula menjadi teori kuantitas uang klasik

apabila diasumsikan V , laju peredaran uang dan juga Y , tingkat output adalah konstan stabil). Dengan demikian teori kuantitas klasik adalah teori inflasi yang menyatakan bahwa tingkat harga adalah proporsional dengan jumlah uang beredar (Dornbusch dan Fischer, 1997)

Menurut teori ini, pengaruh kebijaksanaan moneter terhadap GNP terjadi secara langsung. Jalur mekanisme langsung ini sifatnya sederhana. Menurut pendapatnya, karena sebenarnya mekanisme itu begitu kompleks sehingga sukar untuk digambarkan, maka tidak bisa dinyatakan secara spesifik. Oleh karena itu, tidak bisa digambarkan secara terperinci. Secara skematis, mekanisme transmisi versi monetaris ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.3

Mekanisme Transmisi Moneter Menurut Monetaris



Sumber: Nopirin, Ekonomi Moneter II, 2000

2.1.6.2. Pandangan Keynesian

Perry Warjiyo dan Solikin (2003) menyatakan bahwa kelompok Keynesian memandang bahwa permasalahan dalam suatu perekonomian pada dasarnya sangat kompleks sehingga tidak hanya uang yang berperan penting dalam mendorong kegiatan ekonomi, tetapi juga variabel-variabel lain. Di sisi lain, kelompok Keynesian berasumsi bahwa terjadi sejumlah kekakuan dalam bekerjanya mekanisme pasar di dalam perekonomian, misalnya karena adanya kontrak kerja antara majikan dan pekerja atau pengaturan harga sejumlah komoditas oleh pemerintah. Dengan kondisi ini, apabila terjadi *shocks* dalam perekonomian, misalnya, karena adanya kebijakan moneter yang aktif melakukan pelanggaran atau pengetatan, maka dalam jangka pendek pertumbuhan ekonomi riil akan terpengaruh, meskipun pada akhirnya dalam jangka menengah-panjang

perkembangan harga juga akan terpengaruh.

Di sisi lain, kelompok Keynesian berpendapat bahwa uang dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi riil disamping pengaruhnya terhadap inflasi. Implikasinya adalah bahwa kebijakan moneter dapat dipergunakan sebagai salah satu instrumen kebijakan untuk secara aktif mempengaruhi naik turunnya kegiatan ekonomi riil. Dengan kata lain, bank sentral mempunyai *discretion* untuk mempergunakan kebijakan moneter secara aktif membantu upaya-upaya untuk mempengaruhi naik turunnya kegiatan ekonomi riil. Apabila kegiatan ekonomi riil dirasakan terlalu lesu, kebijakan moneter dapat dilonggarkan sehingga jumlah uang beredar dalam perekonomian bertambah dan dapat mendorong peningkatan kegiatan ekonomi. Sebaliknya, apabila kegiatan ekonomi riil dinilai terlalu cepat dan cenderung memanas, kebijakan moneter perlu diketatkan sehingga terjadi penurunan kegiatan ekonomi riil dan tingkat inflasi dapat terkendali.

Jika menurut pandangan Monetaris, uang sebagai variabel eksogen, maka menurut Keynesian, uang merupakan variabel endogen yang dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi. Keynesian tidak sependapat dengan pandangan Monetaris tentang *velocity of money* yang dianggap stabil atau konstan. Menurut Keynesian, laju perputaran uang di masyarakat tidak bias dianggap konstan. Laju perputaran uang menurut Keynes bersifat tidak stabil, karena adanya permintaan uang untuk tujuan spekulasi yang besar. Adanya permintaan uang untuk spekulasi ini karena Keynes menganggap bahwa fungsi uang bukan hanya sebagai *medium of exchange* tetapi juga sebagai *store of value* (Nopirin, 1997).

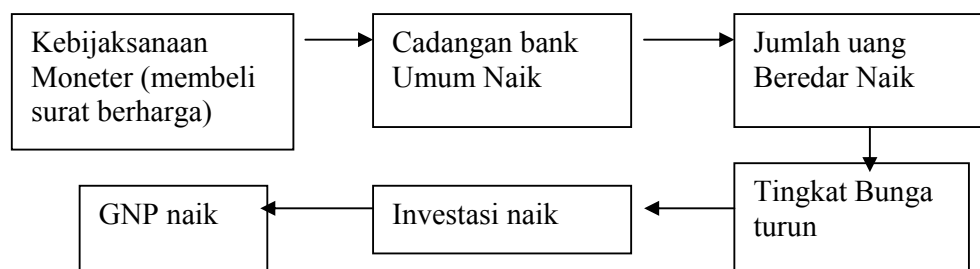
Permintaan uang untuk tujuan spekulasi ini tidak dipengaruhi oleh tingkat pendapatan nasional atau pendapatan masyarakat tetapi lebih dipengaruhi oleh tingkat suku bunga. Menurut Keynesian, tingkat bunga merupakan penghubung utama antara sektor moneter dengan sektor riil. Jika Monetaris menganggap bahwa kebijakan moneter akan membawa

pengaruh langsung terhadap kegiatan ekonomi yang pasti sifatnya. Maka Keynesian berpendapat bahwa pengaruh kebijakan moneter terhadap kegiatan ekonomi tidak bersifat langsung tetapi melalui beberapa jalur. Salah satunya jalur tingkat bunga. Dan menurut Keynesian pengaruh kebijakan moneter terhadap tingkat kegiatan ekonomi bersifat tak pasti.

Dalam ekonomi Keynes, tingkat bunga merupakan penghubung utama antara sektor moneter dengan sektor riil. Perubahan jumlah uang misalnya, akan mempengaruhi tingkat bunga. Perubahan tingkat bunga akan mempengaruhi investasi atau bahkan mungkin juga konsumsi. Investasi merupakan bagian dari pengeluaran total (*aggregate expenditure*). Perubahan dalam pengeluaran total pada gilirannya akan mempunyai efek ganda terhadap keseimbangan pendapatan nasional. Dengan demikian, tingkat bunga yang merupakan biaya modal dapat dipandang sebagai indikator pengaruh kebijaksanaan moneter/ sektor moneter terhadap keseimbangan pendapatan (sektor riil). Secara skematis, jalur tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.4

Mekanisme Transmisi Moneter Menurut Keynes



Sumber: Nopirin, Ekonomi Moneter II, 2000

2.1.7. Tingkat Harga dalam Model IS-LM

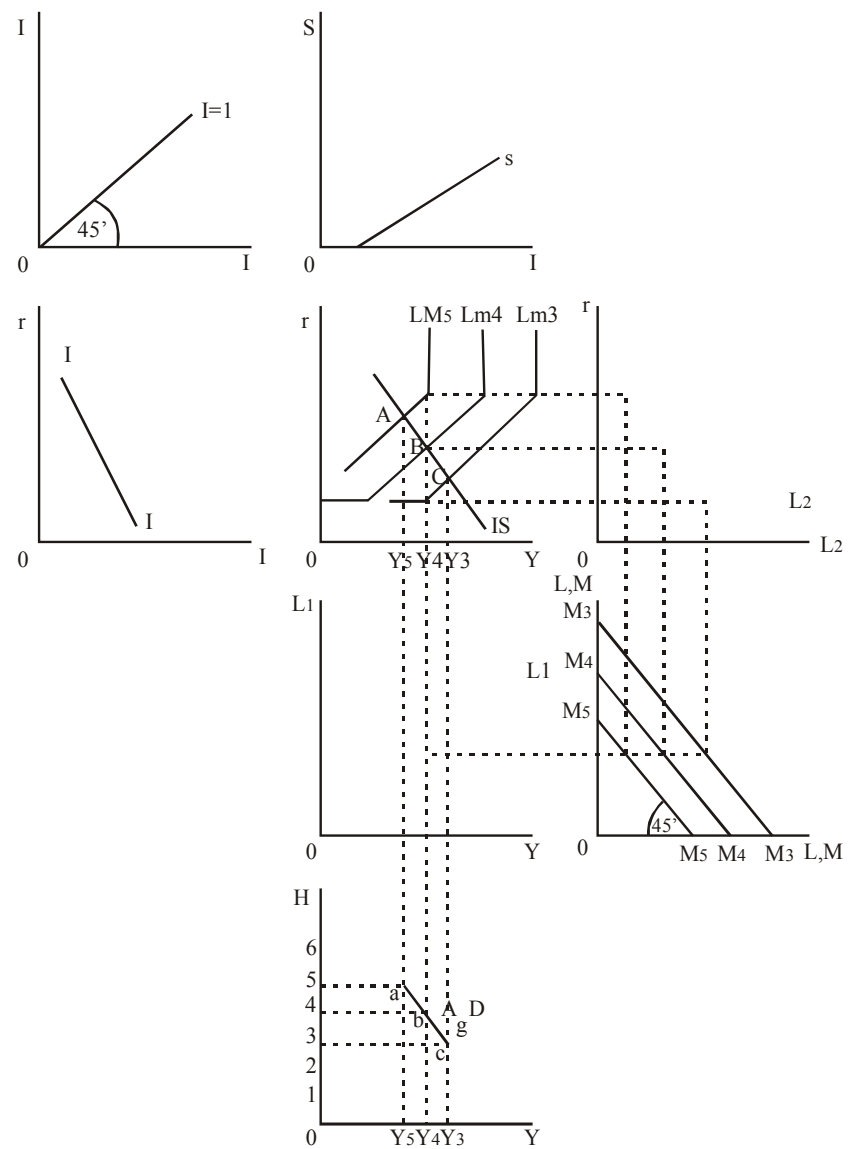
2.1.7.1. Keynes Effect

J.M Keynes melihat bahwa perubahan tingkat harga berpengaruh terhadap tingkat pendapatan nasional *equilibrium* melalui pengaruhnya terhadap *real money supply*, yang dapat pula disebut jumlah penawaran uang nyata. Dalam keadaan deflasi, yaitu di mana tingkat harga mengalami penurunan, nilai riil jumlah uang beredar akan mengalami peningkatan. Dengan jumlah uang yang nilai nominalnya sama dalam arti tidak berubah, menurunnya tingkat harga dengan lima puluh persen, misalnya mengakibatkan meningkatnya *real money supply* menjadi dua kali jumlah semula. Sebaliknya, sebagai akibat adanya inflasi, dengan *nominal money supply* yang sama dihasilkan *real money supply* yang lebih sedikit daripada sebelumnya (Soediyono, 2000).

Pada gambar 2.5, mula-mula tingkat harga setinggi 5. Dengan $H = 5$, *real money supply* tergambar sebagai garis penawaran uang M_5M_5 . Dengan harga menurun menjadi $H = 4$, garis penawaran uang nyata bergeser ke M_4M_4 . Selanjutnya apabila tingkat harga menurun lagi ke $H = 3$, garis *real money supply* bergeser lagi ke M_3M_3 . Bergesernya garis *real supply* MM menjauhi titik sumbu silang 0 ini dengan sendirinya mengakibatkan kurva LM bergeser ke kanan, dari LM_5 ke LM_4 kemudian ke LM_3 . Dengan bergesernya kurva-kurva LM ini, maka titik *equilibrium* IS-LM juga pindah, yaitu semula A, kemudian pindah ke B, lalu ke C (Soediyono, 2000).

Dari uraian di atas, dapat dilihat hubungan antara tingkat harga dengan tingkat pendapatan nasional yang memenuhi syarat *ekuilibriumnya* pasar komoditi dan pasar uang.

Gambar 2.5
Keynes Effect dan Kurva Permintaan Agregat



Sumber: Soediyono, Ekonomi Makro: Analisa IS-LM dan Permintaan-Penawaran Agregatif, 2000

2.1.7.2. Pigou Effect

A.C Pigou dalam artikelnya yang sangat terkenal: “*The Classical Stationary State*”, mencoba menerangkan pengaruh perubahan tingkat harga terhadap kegiatan ekonomi suatu perekonomian melalui pengaruhnya terhadap nilai riil saldo kas masyarakat, yang biasa disebut juga *real cash balance*. Oleh karena itulah, kiranya mudah difahami kalau konsepsinya tersebut terkenal dengan sebutan *Pigou real cash balance effect*, yang biasa juga hanya disingkat *Pigou Effect* (Soediyono, 2000).

Dengan menurunnya tingkat harga, nilai riil saldo kas seseorang meningkat. Meningkatnya nilai riil saldo kas menyebabkan saldo kas yang semula berada dalam keadaan *ekuilibrium* oleh rumah tangga pemiliknya terasa terlalu banyak. Terjadilah sekarang keadaan *disekuilibrium* pada diri konsumen atau rumah tangga tersebut. Mereka ingin mengurangi saldo kasnya sampai pada jumlah yang optimal. Untuk maksud ini mereka akan menambah besarnya pengeluaran konsumsi (Soediyono, 2000).

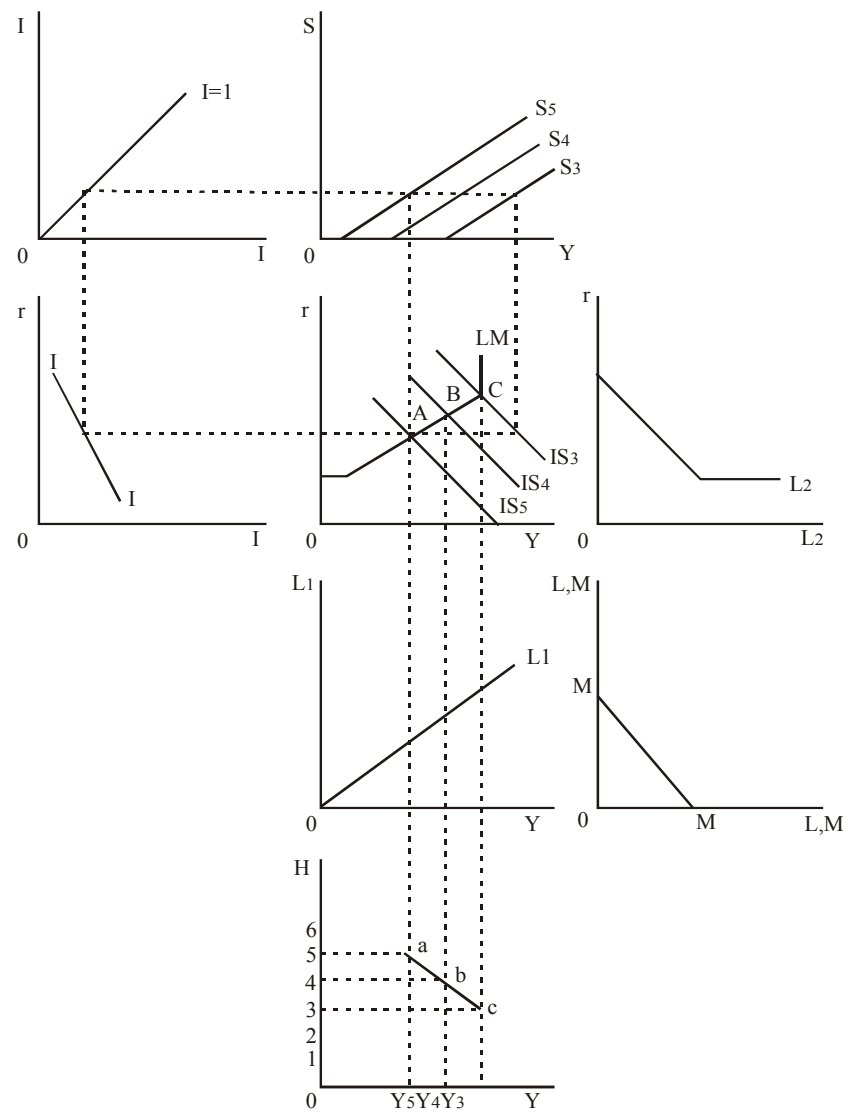
Meningkatnya pengeluaran konsumsi pada tingkat pendapatan yang sama secara grafik tercermin oleh bergesernya kurva atau garis konsumsi menjauhi sumbu pendapatan nasional. Ini berarti juga bahwa kurva atau garis *saving* bergeser mendekat ke sumbu pendapatan nasional. Atau lebih jelasnya variabel C_0 nilainya meningkat dan nilai S_0 menurun. Menurunnya nilai S_0 pada gambar 2.6 terungkap dalam bentuk bergesernya garis *saving*, misalnya dari S_5 ke S_4 , lalu ke S_3 (Soediyono, 2000).

Bergesernya garis *saving* tersebut dengan sendirinya akan mengakibatkan bergesernya kurva IS, dari semula IS_5 bergeser ke IS_4 , lalu ke IS_3 . Bergesernya kurva IS ini selanjutnya mengakibatkan pindahannya titik *ekuilibrium* IS-LM dari semula A, ke B, lalu ke C. Dengan pindahannya titik *ekuilibrium* IS-LM ini berarti tingkat pendapatan nasional *ekuilibrium* juga berubah dari semula OY_5 , menjadi OY_4 , kemudian berubah lagi

menjadi OY_3 . Secara grafik kurva permintaan agregat pada gambar 2.6 berhasil diturunkan dari kaudran IS-LM. Hasilnya adalah kurva abc pada kuadran tengah paling bawah.

Gambar 2.6

Pigou Effect dan Kurva Permintaan Agregat



Sumber: Soediyono, *Ekonomi Makro: Analisa IS-LM dan Permintaan-Penawaran Agregatif*, 2000

2.1.7.3. *Keynes Effect, Pigou Effect dan Permintaan Agregat.*

Setelah mengetahui bagaimana pengaruh Keynes dan Pigou mempengaruhi kegiatan ekonomi dalam suatu masyarakat, dan disamping itu telah diketahui pula bagaimana kedua macam pengaruh tersebut secara sendiri-sendiri menghasilkan kurva permintaan agregat, adalah logis kalau dipermasalahkan juga bagaimana cara menurunkan kurva permintaan agregatif apabila dalam perekonomian *Keynes Effect* dan *Pigou Effect* bekerja berdampingan (Soediyono, 2000).

Telah diketahui bahwa adanya *Keynes effect* terlihat dalam bentuk bergesernya garis penawaran uang riil dari M_5M_5 ke M_4M_4 kemudian M_3M_3 sebagai akibat menurunnya tingkat harga dari semula 5, berubah menjadi 4, kemudian berubah lagi menjadi 3. Bergesernya kurva penawaran uang riil ini selanjutnya mengakibatkan bergesernya kurva LM, dari LM_5 ke LM_4 lalu ke LM_3 . *Pigou effect* di lain pihak terlihat dari bergesernya kurva IS dari IS_5 ke IS_4 , kemudian IS_3 , yang diakibatkan oleh berubahnya tingkat harga yang sama, yaitu dari 5 ke 4 lalu ke 3 (Soediyono, 2000).

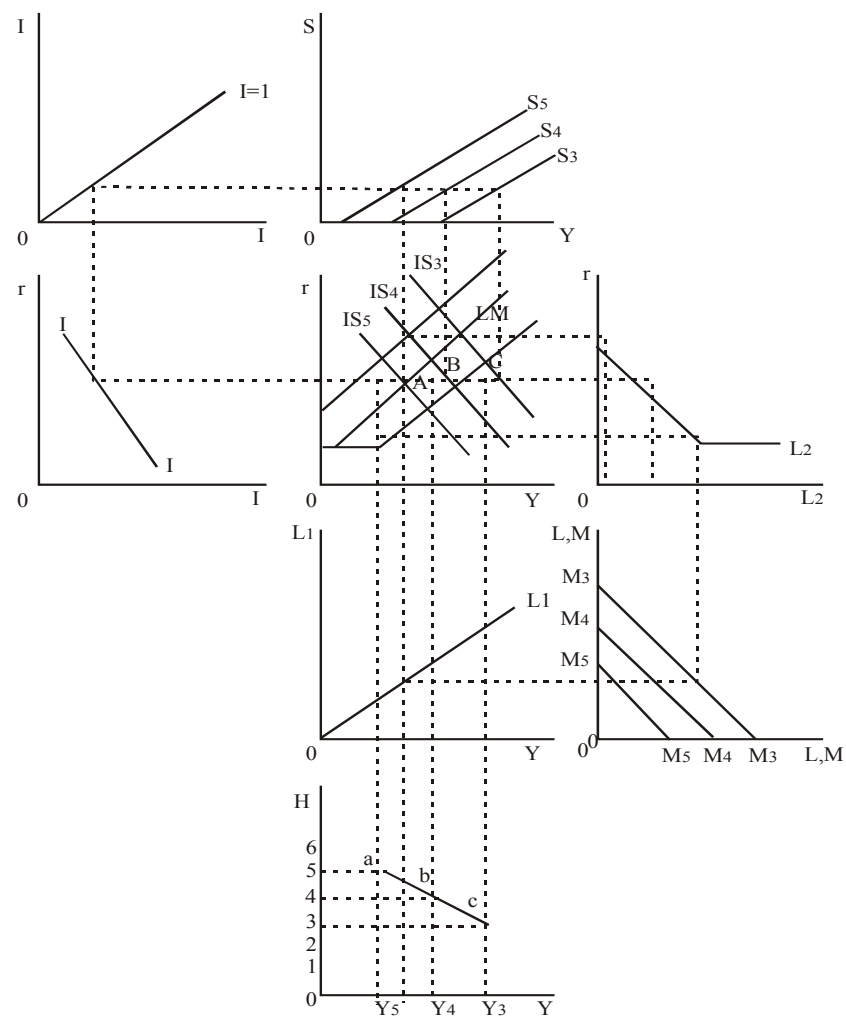
Setelah mengetahui pergeseran kurva IS dan LM, langkah selanjutnya adalah menemukan titik *ekuilibrium* IS-LM. Dalam mencoba menemukan titik-titik *ekuilibrium* tersebut perlu hati-hati. Sebab dengan tiga kemungkinan tingkat harga, sudah ditemukan sembilan titik potong IS-LM. Padahal untuk masing-masing tingkat harga hanya terdapat satu titik *ekuilibrium* IS-LM. Sebagai pegangan dalam menemukan titik *ekuilibrium* IS-LM dapat diketengahkan bahwa hanya titik-titik potong kurva IS dengan kurva LM pada tingkat harga yang sama sajalah yang merupakan titik-titik *ekuilibrium* IS-LM. Dalam gambar 2.7, titik-titik potong IS-LM yang merupakan titik-titik *ekuilibrium* IS-LM hanyalah titik-titik potong A, B, dan C (Soediyono, 2000).

Setelah menemukan titik-titik *ekuilibrium* IS-LM, langkah-langkah selanjutnya dalam

menurunkan kurva permintaan agregat tidak berbeda dengan sebelumnya. Yaitu titik-titik ekuilibrium IS-LM A, B dan C di bawa ke kuadran tengah paling bawah, kuadran yang dapat kita sebut sebagai kuadran permintaan-penawaran agregatif, yang kemudian dari masing-masing titik tersebut ditempatkan pada tingkat harga masing-masing. Pada gambar 2.7, kurva permintaan agregat yang dihasilkan adalah kurva abc.

Gambar 2.7

Keynes Effect, Pigou Effect dan Kurva Permintaan Agregat



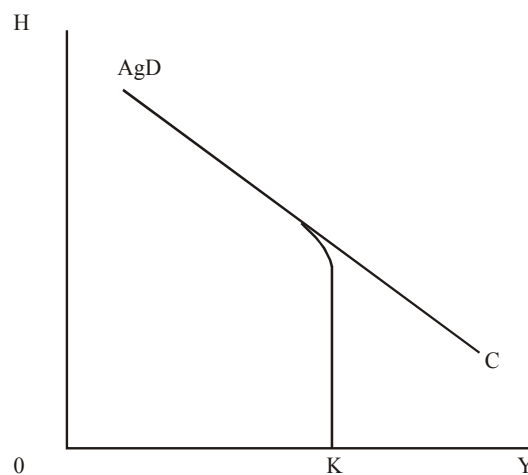
Sumber: Soediyono, Ekonomi Makro: Analisa IS-LM dan Permintaan-Penawaran Agregatif, 2000

2.1.7.4. Bentuk Kurva Permintaan Agregat

Mudah difahami kalau kurva permintaan agregat bentuknya dipengaruhi oleh bentuk kurva-kurva yang merupakan unsur daripada kurva permintaan agregat tersebut. Sehubungan dengan ini, dapat dibedakan antara bentuk kurva permintaan agregat yang diturunkan dari asumsi-asumsi klasik dengan bentuk kurva permintaan agregat yang diturunkan dari asumsi-asumsi Keynes.

Gambar 2.8

**Bentuk Kurva Permintaan Agregatif:
Asumsi Klasik Lawan Asumsi Keynes**



Sumber: Soediyono, Ekonomi Makro: Analisa IS-LM dan Permintaan-Penawaran Agregatif, 2000

Pada gambar 2.8 di mana agDC merupakan kurva permintaan agregat dengan asumsi klasik, sedangkan agDK merupakan kurva permintaan agregat dengan asumsi Keynes.

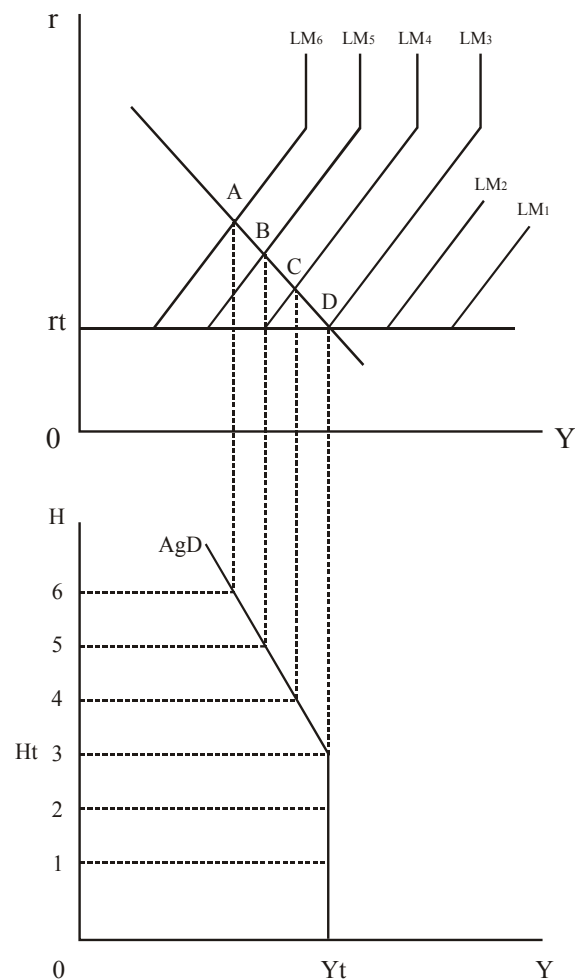
Sebagai konsekuensi dipergunakannya asumsi adanya jerat likuiditas atau *liquidity trap* dan atau inelastik sempurnanya kurva permintaan investasi agregat pada bagian sebelah kanan kurva tersebut, maka kurva permintaan agregat dengan asumsi Keynes

pada tingkat-tingkat harga yang tinggi bentuknya sama dengan bentuk yang dimiliki oleh kurva permintaan agregat dengan asumsi klasik. Tetapi mulai tingkat harga dengan kerendahan tertentu kurva permintaan agregat Keynes menurun lebih cepat dan bahkan akhirnya dapat sejajar dengan sumbu tingkat harga.

Sebaliknya dengan menggunakan asumsi-asumsi Klasik, yang boleh dikatakan tidak mengakui kemungkinan adanya *liquidity trap* dan fungsi permintaan Investasi dengan elastisitas yang sangat rendah, dihasilkan kurva permintaan agregat yang bentuknya seperti terlihat pada gambar 2.9, sebagai kurva agDC.

Gambar 2.9

**Bentuk Kurva Permintaan Agregatif
dengan Adanya Jerat Likuiditas**



Sumber: Soediyono, Ekonomi Makro: Analisa IS-LM dan Permintaan-Penawaran Agregatif, 2000

Mengenai bagaimana *liquidity trap* menghasilkan kurva permintaan agregat yang inelastik sempurna dapat diuraikan dengan menggunakan gambar 2.10. Bekerjanya *Keynes effect* menggeser kurva LM ke kanan. Dalam contoh sebagai akibat menurunnya tingkat harga dari 6 ke 5, kemudian ke 4, dan seterusnya, kurva LM bergeser dari semula LM_6 ke LM_5 , lalu ke LM_4 , dan seterusnya. Ini selanjutnya mengakibatkan titik ekuilibrium IS-

LM pindah dari A ke B, kemudian ke C dan seterusnya.

Sekalipun kurva LM terus bergeser ke kanan sebagai akibat bekerjanya *Keynes effect*, namun sebagai akibatnya adanya *liquidity trap*, bergesernya titik equilibrium IS-LM akan "terjerat" pada titik D oleh jerat likuiditas atau *liquidity trap* tersebut. Dengan terjatuhnya titik equilibrium IS-LM pada titik D, tingkat bunga tidak akan menurun lebih rendah daripada Or_t , dan tingkat pendapatan nasional tidak akan melampaui Oy_t . Selanjutnya hal ini mempunyai makna bahwa mulai dari tingkat harga 3 turun ke bawah, kurva permintaan agregat bergerak sejajar dengan sumbu harga.

2.1.8. Instrumen Moneter

Adiwarman Karim (2002) menyatakan bahwa dalam mengimplementasikan berbagai kebijakannya, bank sentral menggunakan empat instrumen atau alat utama, yaitu:

1. Operasi pasar terbuka (*open market operation/ OMO*)

Operasi pasar terbuka berupa pembelian dan penjualan sekuritas pemerintah (*government securities*) oleh bank sentral yang digunakan untuk mempengaruhi jumlah uang beredar. Pada saat bank sentral melakukan kegiatan jual dan beli sekuritas pemerintah tersebut, perekonomian akan dipengaruhi oleh perubahan jumlah giro cadangan (*reserve*) institusi financial, perubahan harga dan hasil (*yield*) sekuritas, dan perubahan perkiraan (*expectation*) keseluruhan perekonomian.

2. Tingkat diskonto (*discount rate*)

Instrumen kebijakan moneter ini berkaitan dengan fasilitas bank-bank untuk meminjam uang secara langsung kepada bank sentral. Biasanya pinjaman tersebut berbentuk *direct advance* dan *over-draft* yang disekuritisasi dengan asset-aset tertentu (biasanya sekuritas pemerintah). Biaya peminjaman (bunga) pinjaman itulah yang

disebut fasilitas diskonto (*discount rate*).

3. Ketentuan cadangan minimum (*reserve requirement*)

Industri perbankan adalah salah satu industri yang paling banyak diatur oleh undang-undang (*heavily regulated industry*). Salah satu bentuk pengaturan tersebut adalah ketentuan cadangan minimum (*reserve requirement*) atau RR yang biasanya ditetapkan berdasarkan undang-undang perbankan yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Peraturan RR dirancang untuk memberikan jaminan kepada pemilik uang atau nasabah penyimpan (deposan) bahwa jika mereka menarik simpanannya (deposit), mereka pasti akan mendapatkannya.

4. Imbauan moral (*moral suasion*)

Bank sentral dapat menggunakan imbauan moral (*moral suasion*) untuk mendorong institusi *financial* agar membela kepentingan *public*. Biasanya, mereka menggunakan imbauan moral untuk meyakinkan para banker dan manajer senior institusi financial agar lebih memperhatikan kepentingan jangka panjang daripada kepentingan jangka pendek institusinya

2.1.9. Keefektifan Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter

Tidak sulit untuk difahami kalau bentuk kurva IS dan kurva LM besar pengaruhnya terhadap keefektifan kebijaksanaan moneter dan fiskal. Semakin datar bentuk kurva IS, semakin efektif kebijaksanaan moneter. Di lain pihak, semakin datar kurva LM, kebijakan fiskallah yang efektif.

Dengan bentuk standar kurva permintaan akan uang untuk spekulasi, L₂, yang tergambar pada kuadran barat laut, yang selanjutnya dapat dibagi ke dalam tiga bagian, yang masing-masing dengan sebutan (Soediyono, 2000):

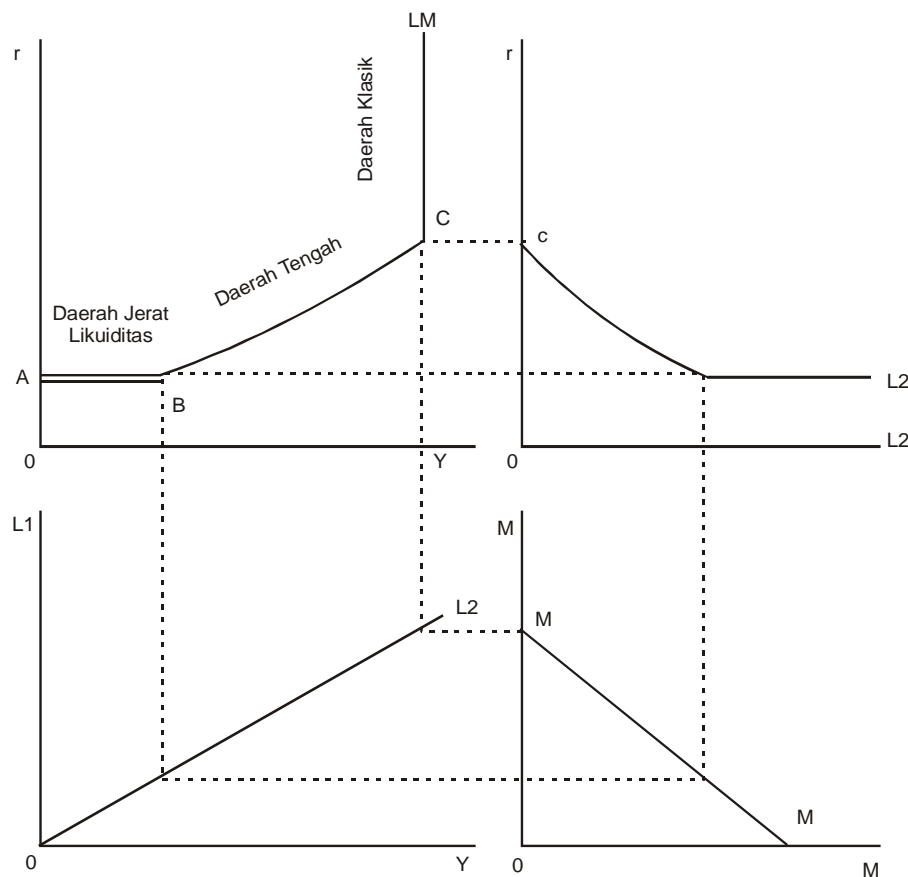
1. Daerah Klasik atau *Classical Range*, yaitu bagian dari kurva LM yang sejajar

dengan sumbu tingkat bunga. Disebut sebagai daerah Klasik, disebabkan daerah inilah yang menghasilkan kesimpulan-kesimpulan teoritik seperti yang dihasilkan oleh para pemikir ekonomi Klasik.

2. Daerah Jerat Likuiditas atau *Liquidity Trap Range*, yaitu bagian dari kurva LM yang sejajar dengan sumbu pendapatan nasional nyata.
3. Daerah Tengah atau *Intermediate Range*, yaitu bagian dari kurva LM yang berada di antara daerah Klasik dan daerah Jerat Likuiditas.

Gambar 2.10

Bentuk Standar Kurva L_2 dan Kurva LM



Sumber: Soediyono, Ekonomi Makro: Analisa IS-LM dan Permintaan-Penawaran Agregatif, 2000

2.1.9.1. Kebijakan Fiskal

Masalah efektifitas kebijakan fiskal seperti yang terlihat pada gambar 2.12 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Di daerah Jerat Likuiditas, kebijakan fiskal paling efektif. Dengan menggeserkan kurva IS ke kanan sejauh ab , pendapatan nasional *ekuilibrium* meningkat sebesar ab juga, yaitu semula Oy_a , sekarang menjadi Oy_b .
2. Di daerah tengah, kebijakan fiskal juga dapat menaikkan tingkat pendapatan nasional *ekuilibrium*, akan tetapi tidak dapat seefektif di daerah Jerat Likuiditas. Kebijakan fiskal yang berhasil menggeser kurva IS ke kanan sejauh cd , yang jaraknya sama dengan ab , menghasilkan peningkatan tingkat pendapatan nasional kurang dari cd , yaitu hanya meningkat dari semula Oy_c menjadi Oy_m .
3. Di daerah Klasik, kebijakan fiskal sama sekali tidak efektif. Kebijakan fiskal yang berhasil menggeser kurva IS sejauh ef , eg ataupun lebih besar lagi, pendapatan nasional *ekuilibrium* sama sekali tidak meningkat, yaitu tetap sebesar OY_e .

2.1.9.2. Kebijakan Moneter

Dengan kebijakan moneter yang berhasil menggeser kurva LM dari LM_0 ke LM_1 dengan titik *ekuilibrium* IS-LM yang berada:

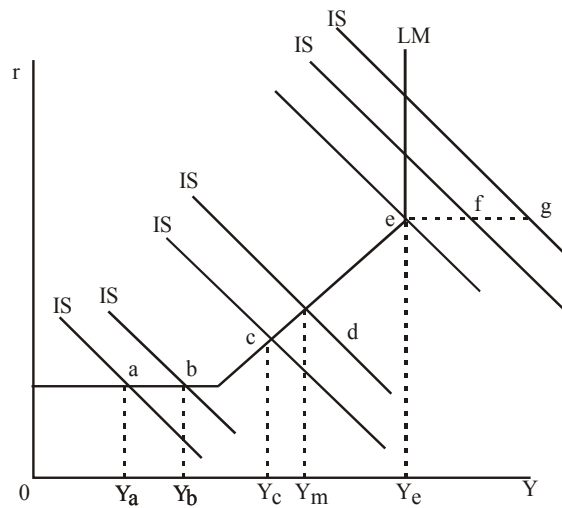
1. Di daerah Jerat Likuiditas, kebijakan moneter sama sekali tidak efektif. Sama sekali tidak berhasil menaikkan tingkat pendapatan nasional *ekuilibrium*.
2. Di daerah tengah, kebijakan moneter mampu menaikkan tingkat pendapatan nasional *ekuilibrium*, akan tetapi tidak seefektif di daerah Klasik.
3. Di daerah Klasik, kebijakan moneter adalah paling efektif. Dengan peningkatan jumlah uang beredar yang sama, kalau titik *ekuilibrium* IS-LM berada di daerah tengah, bertambah besarnya pendapatan nasional *ekuilibrium* hanya sebesar Y_bY_f ,

sedangkan apabila titik *ekuilibrium* IS-LM berada di daerah Klasik, tambahan pendapatan nasional *ekuilibrium* yang dihasilkan akan sebesar $Y_c Y_g$.

Selanjutnya uraian di atas dapat dilihat pada gambar 2.13.

Gambar 2.11

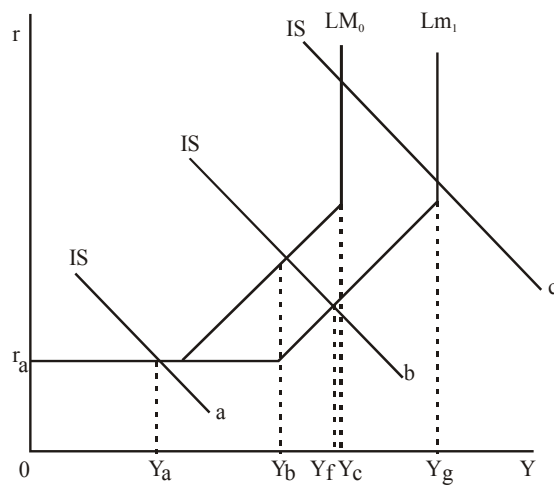
Kebijakan Fiskal



Sumber : Soediyono, Ekonomi Makro: Analisa IS-LM dan Permintaan-Penawaran Agregatif, 2000

Gambar 2.12

Kebijakan Moneter



Sumber : Soediyono, Ekonomi Makro: Analisa IS-LM dan Permintaan-Penawaran Agregatif, 2000

2.1.10. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan Dumairy (1987) dengan menggunakan uji kausalitas Granger, dimaksudkan untuk mengetahui pola atau arah kausalitas; apakah penambahan JUB menyebabkan kenaikan harga-harga ataukah sebaliknya. Data yang digunakan adalah dari tahun 1968.1 – 1985.2. Konsep uang beredar yang digunakan adalah M_1 sedangkan tingkat harga diwakili oleh indeks biaya hidup di Jakarta. Hasil temuannya adalah bahwa pengaruh ekspansi moneter terhadap inflasi bersifat lebih nyata (lebih segera, lebih signifikan dan lebih pasti) daripada pengaruh inflasi terhadap ekspansi moneter. Ini mengisyaratkan bahwa keabsahan pendapat umum lebih kuat daripada pandangan alternatifnya, yakni inflasi lebih disebabkan oleh ekspansi moneter daripada sebagai konsekuensi logis pembangunan.

Erwin Haryono, Wahyu Agung Nugroho dan Wahyu Pratomo (2000) mengadakan penelitian mengenai “Mekanisme Pengendalian Moner dengan Inflasi sebagai Sasaran Tunggal” dengan menggunakan empat alat analisis, yaitu *Hsiao-Granger Causality*, *Cointegration Tes*, *Vector Autoregression (VAR)* dan *Poole's Analysis*. Hasil penelitiannya sebagai berikut:

a. Pengujian jalur *quantity*

1. Uji Hsiao-Granger Causality dengan data bulanan tahun 1990-1999, dengan hasil
 - Pengaruh M_0 terhadap M_2 rupiah bersifat *bidirectional causality*
 - Tidak terdapat hubungan antara M_0 dan M_1 .
 - M_0 , M_1 dan M_2 berpengaruh secara searah terhadap inflasi *underlying*.

Dengan demikian, hasil dengan menggunakan uji Hsiao-Granger Causality tersebut tidak seluruhnya mendukung hipotesis tentang mekanisme transmisi dari kebijakan moneter berdasarkan *quantity approach*.

2. VAR dengan menggunakan uji *impulse response* (data kuartalan 1990 – 1999), dengan hasil:

- M_0 sebagai sasaran operasional mempunyai pengaruh positif terhadap M_1 sebagai sasaran antara dengan *policy lag* 0-1 kuartal,
- Perubahan M_1 membutuhkan lag selama lima kuartal untuk mempengaruhi inflasi *underlying*.
- *Lag* secara keseluruhan antara sasaran operasional dengan sasaran akhir (*underlying inflation*) adalah sekitar 5-6 kuartal

Dari hasil dengan VAR di atas dapat disimpulkan bahwa, masih berjalannya transmisi kebijakan moneter dalam kerangka *quantity approach* menunjukkan bahwa kerangka kebijakan moneter yang selama ini ditempuh oleh BI cukup efektif dalam mempengaruhi inflasi.

3. *Cointegration Test*

- Variabel M_1 dan M_2 hanya mempunyai hubungan jangka panjang (*cointegrated*) dengan M_0 sampai dengan 1998. Hal ini membuktikan bahwa hubungan jangka panjang antara M_0 dengan M_1 dan M_2 tidak stabil sehingga akan mengurangi efektifitas kebijakan moneter yang menggunakan *quantity approach*.

Arintoko (2002) melakukan penelitian mengenai “Analisis Perilaku Inflasi Jangka Pendek dan Jangka Panjang Atas Faktor-faktor Penyebab Utama Di Indonesia 1999.1 – 2001.1” dengan menggunakan teknik analisis ECM. Variabel-variabel yang digunakan adalah Likuiditas perekonomian (M_2), Penawaran domestik, Konsumsi total, Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan tingkat bunga nominal. Hasil analisisnya adalah dalam jangka pendek secara serentak variabel-variabel Likuiditas perekonomian (M_2),

Penawaran domestik, Konsumsi total, Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan tingkat bunga nominal signifikan mempengaruhi variasi laju inflasi di Indonesia. Sedangkan secara parsial variabel M_2 , nilai tukar dan tingkat bunga berpengaruh positif terhadap laju inflasi. Dalam jangka panjang, variabel Likuiditas perekonomian, nilai tukar rupiah dan tingkat bunga nominal berpengaruh positif terhadap laju inflasi. Sedangkan penawaran domestik berpengaruh negatif terhadap laju inflasi di Indonesia.

Penelitian Umi Julaihah dan Insukindro (2004) ingin melihat peran agregat moneter (M_0) dan suku bunga SBI dalam studi dampak kebijakan moneter. Dalam penelitiannya menggunakan teknik analisis VAR/VECM. Terdapat dua model; model pertama dengan variabel *independen* adalah M_0 dan variabel dependennya adalah suku bunga deposito, IHK, PDB dan Nilai tukar. Sedangkan model kedua, dengan variabel *independen* adalah suku bunga SBI dan variabel dependennya adalah suku bunga deposito, IHK, PDB dan nilai tukar. Data yang digunakan adalah dari tahun 1983.1 – 2003.2

Berdasarkan hasil uji *impulse response* yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak merespon adanya kejutan satu standar deviasi dari uang primer. Sedangkan pengaruh uang primer terhadap inflasi yang terlihat cukup signifikan, ternyata menghasilkan *price puzzle*. *Price puzzle* merupakan kondisi di mana ekspansi moneter yang dilakukan oleh otoritas moneter ternyata direspon dengan penurunan inflasi. Penggunaan suku bunga SBI sebagai variabel kebijakan ternyata memberikan hasil yang lebih baik daripada penggunaan uang primer. Pada saat suku bunga SBI dimasukkan ke dalam model, maka *liquidity puzzle* dan *price puzzle* dapat dihindari. Sehingga interpretasi ekonomi dari hasil *impulse response* lebih mudah dan sesuai dengan teori. Penggunaan agregat moneter untuk kasus di Indonesia ternyata hanya berdampak pada inflasi dan tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan *variance decomposition*, maka terlihat bahwa uang primer tidak mampu memberikan kontribusi terhadap variasi pertumbuhan ekonomi, uang primer hanya berkontribusi terhadap variabilitas inflasi sebesar 5 %. Sedangkan SBI memiliki kemampuan untuk menjelaskan variabilitas pertumbuhan ekonomi sekitar 2,2 % hingga 14 %, dan SBI terlihat lebih mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ketika horizon waktu semakin panjang. Hal yang menarik dari *variance decomposition* adalah bahwa nilai tukar ternyata sangat dipengaruhi oleh variabel kebijakan, yaitu baik ketika menggunakan variabel kebijakan uang primer maupun ketika menggunakan SBI. Uang primer mampu menjelaskan variabilitas nilai tukar sebesar 10 % hingga 22 %, sedangkan SBI mampu menjelaskan variabilitas nilai tukar sebesar 25 % hingga 30 %. Jadi, dapat disimpulkan bahwa adanya kejutan kebijakan moneter ternyata direspon secara cepat oleh nilai tukar dibandingkan dengan variabel-variabel ekonomi makro lainnya.

2.2. Kerangka Pemikiran Teoritis

Kebijakan moneter merupakan kebijakan otoritas moneter atau bank sentral dalam bentuk pengendalian besaran moneter dan suku bunga untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan (Perry Warjiyo dan Solikin, 2003).

Apabila kebijakan moneter dijalankan, ia menimbulkan beberapa rangkaian perubahan-perubahan dalam perekonomian yang pada akhirnya menyebabkan perubahan dalam pendapatan nasional dan penggunaan tenaga kerja. Rangkaian perubahan-perubahan yang berlaku itu dinamakan mekanisme transmisi (Sadono Sukirno, 2000). Pengaruh kebijakan moneter pertama sekali akan dirasakan oleh sektor moneter perbankan, yang kemudian ditransfer ke sektor riil.

Perdebatan mengenai mekanisme transmisi kebijakan moneter sudah berlangsung sejak lama antara aliran Klasik dan Keynes. Menurut Keynes, proses bekerjanya

pengaruh gejala moneter terhadap perekonomian dapat dibagi dalam tiga bagian, yaitu: *pertama*, mekanisme penyesuaian di sektor moneter, *kedua*, mekanisme pemindahan gejala ekonomi dari sektor moneter ke sektor riil, dan *ketiga*, mekanisme penyesuaian yang terjadi di sektor riil. Sehingga, mekanisme transmisi yang dipakai teori Keynes adalah mekanisme transmisi tidak langsung (Soediyono, 2000).

Sebaliknya, teori kuantitas uang dari aliran klasik menganut mekanisme transmisi yang langsung (*direct transmission mechanism*). Di dalam menerangkan mengenai teori kuantitas uang yang dilakukan Irving Fisher, digunakan persamaan aljabar yang dinamakan persamaan pertukaran (*The Equation of Exchange*). Persamaan pertukaran tersebut pada umumnya dinyatakan sebagai berikut:

$$MV = PT$$

Di mana:

- M adalah uang beredar (penawaran uang)
- V adalah kelajuan peredaran uang
- P adalah tingkat harga-harga
- T adalah jumlah barang-barang dan jasa-jasa yang diperjualbelikan di dalam suatu tahun tertentu

Di dalam persamaan itu, M diartikan dalam pengertian uang beredar yang sempit. Ini berarti adalah sama dengan uang kertas, logam dan uang giral yang terdapat dalam perekonomian. Kelajuan peredaran uang, yaitu V, ditentukan berdasarkan keseringan (berapa seringnya) uang beredar yang terdapat dalam masyarakat berpindah tangan dalam satu tahun. Dalam menentukan nilai P yang perlu diketahui adalah indeks harga. Faktor yang terakhir dalam persamaan pertukaran di atas, yaitu T, menunjukkan

jumlah barang-barang jadi dan barang-barang setengah jadi yang diperjualbelikan (Sadono Sukirno, 2000). Secara matematis, persamaan pertukaran (*The Equation of Exchange*) dapat diturunkan menjadi:

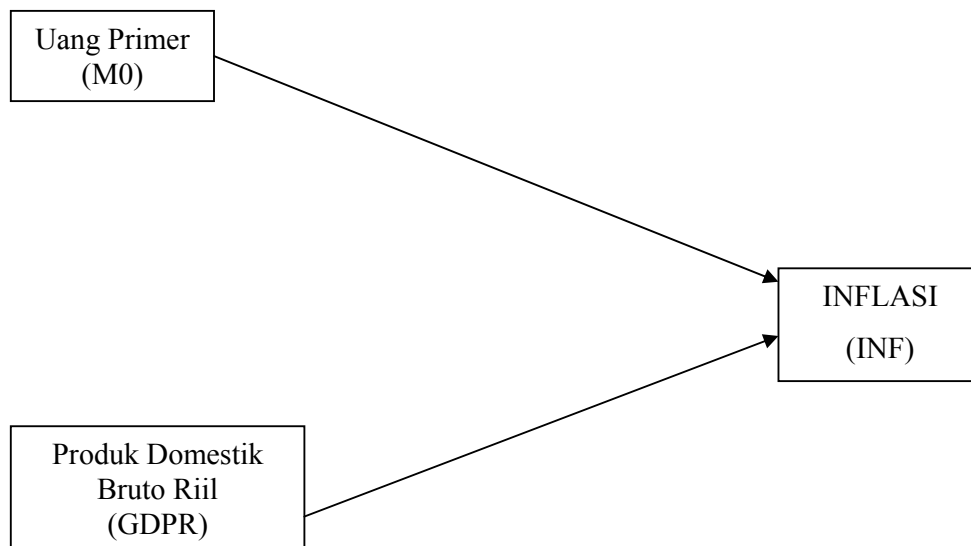
$$MV = PT$$

$$P = \frac{MV}{T}$$

Dengan mengasumsikan bahwa V (*Velocity of money*) adalah konstan, maka persamaan pertukaran *menghasilkan* hubungan yang positif antara tingkat harga (P) dan M (Jumlah uang beredar), serta hubungan yang negatif antara harga (P) dengan T (jumlah barang-barang dan jasa-jasa yang diperjualbelikan di dalam suatu tahun tertentu)

Gambar 2.13

Kerangka Model Penelitian



2.3. Hipotesis

Berdasarkan tinjauan pustaka dan kajian terhadap studi terdahulu yang relevan, maka hipotesis yang akan diuji kebenarannya secara empiris sebagai berikut:

1. Uang Primer berpengaruh positif terhadap laju inflasi di Indonesia pada 1998.1 sampai dengan 2003.4
2. Produk Domestik Bruto Riil berpengaruh negatif terhadap laju inflasi di Indonesia pada 1998.1 sampai dengan 2003.4

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Definisi Operasional Variabel

Untuk memberikan kejelasan mengenai penggunaan beberapa konsep dalam penelitian ini, maka perlu diberikan definisi operasional konsep-konsep tersebut.

a. Laju Inflasi (LINF)

Adalah suatu kenaikan harga yang terus menerus dari barang-barang dan jasa-jasa secara umum (bukan satu macam barang dan sesaat). Perhitungan laju inflasi disini menggunakan konsep inflasi IHK (Indeks Harga Konsumen) yang dipublikasikan oleh BPS (Badan Pusat Statistik). Data yang digunakan adalah data kuartalan selama periode penelitian, yaitu tahun 1998.1 sampai dengan 2003.4

b. Uang Primer (LM0)

Adalah uang yang diedarkan pemerintah yang dipegang oleh masyarakat dan bank-bank. Uang primer terdiri dari uang kertas dan uang logam yang diedarkan (uang kartal dan kas bank), saldo giro bank dan saldo giro perusahaan dan perorangan. Data yang diambil adalah data uang primer selama periode penelitian, yaitu tahun 1998.1 sampai dengan 2003.4 dalam miliar rupiah. Data diperoleh dari publikasi Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.

c. Produk Domestik Bruto Riil (LGDP)

Adalah nilai barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan suatu negara dalam satu tahun dan dihitung pada harga yang tetap, yaitu harga yang berlaku pada suatu tahun tertentu yang seterusnya digunakan untuk menilai barang dan jasa yang dihasilkan pada tahun-tahun yang lain. Data yang diambil adalah data Produk Domestik Bruto atas dasar

harga konstan tahun 1993 (Riil) selama periode penelitian, yaitu tahun 1998.1 sampai dengan 2003.4 dalam miliar rupiah. Data diperoleh dari publikasi Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data runtun waktu (*time series*) pada tahun 1998.1 sampai dengan 2003.4 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia (BI).

3.3. Teknik Analisis

Model estimasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi dengan model dinamis, yaitu dengan menggunakan model koreksi kesalahan (*Error Correction Model/ ECM*). Dalam konteks ekonomi, spesifikasi model dinamis penting artinya karena berkaitan dengan pembentukan model dari suatu sistem ekonomi yang berhubungan dengan perubahan waktu (Insukindro, 1992).

Dalam perekonomian, ketergantungan variabel *dependen* dan *independen* jarang terjadi secara seketika, hal ini disebabkan karena adanya selang waktu yang biasa disebut *lag* (kelambanan) (Gujarati, 2003). Alasan digunakan variabel *lag* dalam analisis model linier dinamik adalah: 1) alasan psikologis, yaitu adanya unsur kebiasaan di mana orang tidak mudah merubah perilakunya secara mendadak; 2) alasan teknologi, terdapat kesulitan secara teknis; 3) alasan kelembagaan, adanya regulasi yang mengakibatkan lambatnya reaksi (Gujarati, 2003).

Model dinamis yang relatif baik untuk digunakan adalah model koreksi kesalahan (ECM), di mana faktor gangguan yang merupakan "*equilibrium error*" diparameterisasi. Kesalahan ekuilibrium ini dapat digunakan untuk mengkaitkan perilaku jangka pendek

terhadap nilai jangka panjang antara variabel-variabel ekonomi. Bila dalam jangka pendek terdapat ketidakseimbangan dalam satu periode maka model koreksi kesalahan akan mengoreksi pada periode berikutnya, sehingga mekanisme model koreksi kesalahan dapat diartikan sebagai penyelaras perilaku jangka pendek dan jangka panjang (Insukindro, 1990).

Manfaat dari penggunaan model dinamis sendiri adalah untuk menghindari masalah regresi lancung (*spurious regression*). Suatu regresi linier dikatakan lancung bila anggapan dasar klasik regresi linier tidak terpenuhi. Akibat yang ditimbulkan oleh suatu regresi lancung antara lain: koefisien regresi penaksir tidak efisien, peramalan berdasarkan regresi tersebut akan meleset dan uji baku yang umum untuk koefisien regresi menjadi tidak sah (*invalid*) (Insukindro, 1991).

3.3.1. Analisis Perilaku Data

3.3.1.1 Uji Stasioneritas

Hal pertama yang harus dilakukan adalah meneliti apakah data tersebut stasioner atau tidak. Uji stasioneritas ini perlu dilakukan, karena suatu analisa regresi sebaiknya tidak dilakukan apabila data yang digunakan tidak stasioner dan biasanya jika hal itu tetap dilakukan maka persamaan yang dihasilkan bersifat regresi lancung (*spurious regression*). Suatu data disebut stasioner apabila nilai rata-rata mean dan varians konstan selama periode pengamatan. Asumsi stasioneritas ini mempunyai konsekuensi penting untuk menterjemahkan data dalam model ekonomi, karena data yang stasioner akan tidak terlalu bervariasi dan cenderung mendekati nilai rata-ratanya (Gujarati, 2003).

Uji stasioneritas data dilakukan dengan menggunakan uji akar-akar unit (*unit root test*) dan uji derajat integrasi (*integration test*).

3.3.1.1.1. Uji Akar-akar Unit (*Unit root test*)

Salah satu konsep yang penting dalam teori ekonometrika adalah adanya asumsi stasioneritas, anggapan ini mempunyai konsekuensi yang sangat penting dalam menjelaskan data dan model ekonomi.

Untuk menguji perilaku data pada penelitian dapat memakai uji Dickey-Fuller (DF) dan Augmented Dickey Fuller (ADF).

a. Rumus Dickey Fuller Test adalah sebagai berikut (Gujarati, 2003):

$$DX_t = a_0 + a_1 BX_t + \sum_{t=1}^k b_k B^k DX_t \quad (3.1)$$

di mana:

$$DX_t = X_t - X_{t-1}$$

B = operasi kelambanan (*backward lag operator*)

X_t = variabel yang diamati pada periode t

Nilai DF untuk menguji hipotesa bahwa $a_1 = 0$, yang ditunjukkan oleh nilai statistik t pada koefisien regresi BX_t . Pengambilan keputusannya adalah apabila DF hitung dari suatu variabel lebih besar dari nilai kritis MacKinnon, berarti variabel tersebut stasioner, begitu pula sebaliknya.

b. Rumus Augmented Dickey Fuller Test adalah sebagai berikut (Gujarati, 2003):

$$DX_t = c_0 + c_1 T + c_2 BX_t + \sum_{t=1}^k d_k B^k DX_t \quad (3.2)$$

di mana:

$$DX_t = X_t - X_{t-1}$$

B = operasi kelambanan (*backward lag operator*)

X_t = variabel yang diamati pada periode t

T = *trend* waktu

Nilai ADF untuk menguji hipotesa bahwa $c_1 = 0$, yang ditunjukkan oleh nilai statistik t pada koefisien regresi BX_t . Pengambilan keputusannya adalah apabila ADF hitung dari suatu variabel lebih besar dari nilai kritis MacKinnon, berarti variabel tersebut stasioner, begitu pula sebaliknya.

3.3.1.2. Uji Derajat Integrasi (*Integration test*)

Uji derajat integrasi merupakan kelanjutan dari uji akar-akar unit dan hanya diperlukan apabila seluruh datanya belum stasioner pada derajat nol atau 1 (0). Uji derajat integrasi digunakan untuk mengetahui pada derajat berapa data akan stasioner. Apabila data belum stasioner pada derajat satu, maka pengujian harus tetap dilanjutkan sampai masing-masing variabel stasioner.

Untuk melakukan uji ini digunakan uji Dickey Fuller (DF) dan Augmented Dickey Fuller (ADF).

a. Rumus Dickey Fuller Test adalah sebagai berikut (Gujarati, 2003):

$$D^2X_t = e_0 + e_1BX_t + \sum_t^k \beta_k B^k D^2X_t \quad (3.3)$$

di mana:

$$D^2X_t = (1-B)DX_t$$

$$BDX_t = DX_{t-1}$$

X_t = variabel yang diamati pada periode t

Jika $e_1 = 1$ maka X_t dikatakan terintegrasi dengan derajat satu atau $I(1)$ atau X_t akan stasioner pada derivasi pertama. Pengambilan keputusannya adalah apabila DF hitung dari suatu variabel lebih besar dari nilai kritis MacKinnon, berarti variabel tersebut

stasioner, begitu pula sebaliknya.

b. Rumus Dickey Fuller Test adalah sebagai berikut (Gujarati, 2003):

$$D^2X_t = g_0 + g_1T + g_2BDX_t + \sum_{t=1}^k h_k B^k D^2X_t \quad (3.4)$$

di mana:

$$D^2X_t = (1-B)DX_t$$

$$BDX_t = DX_{t-1}$$

$$X_t = \text{variabel yang diamati pada periode } t$$

Jika $g_1 = 1$ maka X_t dikatakan terintegrasi dengan derajat satu atau $I(1)$ atau X_t akan stasioner pada derivasi pertama. Pengambilan keputusannya adalah apabila DF hitung dari suatu variabel lebih besar dari nilai kritis MacKinnon, berarti variabel tersebut stasioner, begitu pula sebaliknya.

3.3.1.2. Uji Kointegrasi (*Cointegration approach*)

Uji kointegrasi merupakan lanjutan dari uji akar-akar unit dan uji derajat integrasi. Uji kointegrasi dimaksudkan untuk mengetahui perilaku data dalam jangka panjang antar variabel terkait apakah berkointegrasi atau tidak seperti yang dikehendaki oleh teori ekonomi. Untuk dapat melakukan uji kointegrasi, harus yakin terlebih dahulu bahwa variabel-variabel yang terkait dalam pendekatan ini mempunyai derajat integrasi yang sama atau tidak. Implikasi pentingnya jika dua variabel atau lebih mempunyai derajat integrasi yang berbeda, misal: $X = I(1)$ dan $Y = I(2)$, maka kedua variabel tersebut tidak dapat berkointegrasi. Cara pengujiannya adalah dengan menguji residualnya berintegrasi atau tidak. Apabila residualnya berintegrasi, berarti data tersebut sudah memenuhi

prasyarat dalam pembentukan dan estimasi model dinamis. Untuk melakukan uji kointegrasi dilakukan dengan beberapa macam uji, yaitu: Engle-Granger test (EG), Augmented Engle-Granger (AEG) test, dan Cointegrating Regression Durbin Watson (CRDW). Namun, pada penelitian ini, penulis hanya akan menggunakan Cointegrating Regression Durbin-Watson (CRDW)

Caranya adalah dengan meregres variabel *dependen* dengan variabel *independen*, setelah nilai DW diketahui, maka DW dibandingkan. Apabila nilai DW hitung lebih besar dari DW tabel maka variabel tersebut telah berkointegrasi, yang artinya antar variabel-variabel tersebut dalam jangka panjang terjadi hubungan yang *equilibrium* (Gujarati, 2003).

3.3.2. Model Koreksi Kesalahan (*Error Correction Model*)

Hubungan antara laju inflasi dengan uang primer dan Pendapatan Domestik Bruto Riil dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{LINF}_t = f(\text{LM0}_t, \text{LGDP}_t)$$

Di mana:

LINF_t = Laju Inflasi

LM0_t = Uang Primer

LGDP_t = Produk Domestik Bruto Riil

Selanjutnya dengan mengikuti pendekatan yang dikembangkan oleh Domowitz dan Elbadawi (1987) dapat dirumuskan fungsi biaya kuadrat periode tunggal (*single period quadratic cost function*) sebagai berikut:

$$C_{e_t} = e_1(\text{DLINF}_t - \text{DLINF}_t^*) + e_2 [(1-B) \text{DLINF}_t - f_t (1-B)Z_t]^2 \quad (3.5)$$

Dimana komponen pertama persamaan di atas mencerminkan biaya ketidakseimbangan

dan komponen kedua merupakan biaya penyesuaian. $DLINF_t$ merupakan laju inflasi periode t , Z_t merupakan variabel yang mempengaruhi $DLINF_t$ dan f_t merupakan faktor pembobot (Insukindro, 1999)

Model dasar penelitian ini adalah

$$LINF_t = \beta_0 + \beta_1 LM0_t + \beta_2 LGDPR_t \quad (3.6)$$

Dimana:

$LINF_t$ = Laju Inflasi

$LM0_t$ = Uang Primer

$LGDPR_t$ = Produk Domestik Bruto Riil

Selanjutnya dilakukan minimisasi fungsi biaya terhadap $DLINF$ sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \frac{DC_t}{DLINF_t} &= 0 = 2 e_1(DLINF_t - DLINF_t^*) + 2 e_2 [(1-B) DLINF_t - f_t(1-B)Z_t] \\ 0 &= e_1(DLINF_t - DLINF_t^*) + e_2 [(1-B) DLINF_t - f_t(1-B)Z_t] \\ 0 &= e_1 DLINF_t - e_1 DLINF_t^* + e_2 DLINF_t - e_2 B DLINF_t - e_2 f_t(1-B)Z_t \\ e_1 DLINF_t + e_2 DLINF_t &= e_1 DLINF_t^* + e_2 B DLINF_t - e_2 f_t(1-B)Z_t \\ (e_1 + e_2) DLINF_t &= e_1 DLINF_t^* + e_2 B DLINF_t - e_2 f_t(1-B)Z_t \end{aligned} \quad (3.7)$$

$$DLINF_t = \frac{e_1}{(e_1 + e_2)} DLINF_t^* + \frac{e_2}{(e_1 + e_2)} B DLINF_t - \frac{e_2}{(e_1 + e_2)} f_t(1-B)Z_t \quad (3.8)$$

Persamaan 3.7 dan 3.8 di atas ekuivalen dengan:

$$DLINF_t = e DLINF_t^* + (1-e) BLINF - (1-e) f_t(1-B)Z_t \quad (3.9)$$

Di mana Z_t merupakan variabel yang berpengaruh terhadap $DLINF_t$; persamaan 3.5 disubstitusikan ke model dasar 3.6 menjadi:

$$\begin{aligned} DLINF_t &= b_0 + b_1 e LM0_t + b_2 e LGDPR_t + b_3(1-B) B DLINF_t + (1-e) f_1(1-B) LM0_t \\ &+ (1-e) f_2(1-B) LGDPR_t \end{aligned} \quad (3.10)$$

$$DLINF_t = b_0 + b_1eLM0_t + (1-e)f_1(1-B)LM0_t + b_2eLGDPR_t + (1-e)f_2(1-B)LGDPR_t + b_3(1-B)BDINF_t \quad (3.11)$$

Persamaan 3.11 ekuivalen dengan

$$LINF_t = b_0e + [b_1e + (1-e)f_1]LM0_t - (1-e)BLM0_t + [b_2e + (1-e)f_2]LGDPR_t - (1-e)BLGDPR_t + b_3(1-e)BLINF_t \quad (3.12)$$

Dengan demikian diperoleh hasil model dinamis:

$$DLINF_t = \beta_0 + \beta_1LM0_t + \beta_2LGDPR_t + \beta_3BLM0_t + \beta_4BLGDPR_t + \beta_5(LM0_t + LGDPR_t - LINF_t) \quad (3.13)$$

Di mana:

$$\beta_0 = b_0e$$

$$\beta_1 = b_1e + (1-e)f_1$$

$$\beta_2 = b_2e + (1-e)f_2$$

$$\beta_3 = -(1-e)f_1$$

$$\beta_4 = -(1-e)f_2$$

$$\beta_5 = b_3(1-e)$$

Dengan berdasarkan pada model dasar persamaan pada penelitian ini, maka akan ditransfer ke dalam bentuk ECM (*Error Correction Model*) yang telah diparameterisasi.

$$DLINF_t = \beta_0 + \beta_1DLM0_t + \beta_2DLGDPR_t + \beta_3BLM0_t + \beta_4BLGDPR_t + \beta_5B(LM0_t + LGDPR_t - LINF_t) \quad (3.14)$$

Di mana:

$$DLINF_t = LINF_t - LINF_{t-1}$$

$$B = \textit{Backward lag operator}$$

Persamaan 3.14 dapat ditulis kembali dalam bentuk

$$DLINF_t = \beta_0 + \beta_1LM0_t + \beta_2LGDPR_t + \beta_3BLM0_t + \beta_4BLGDPR_t + \beta_5ECT \quad (3.15)$$

Persamaan 3.15 dapat ditulis kembali dalam bentuk:

$$DLINF_t = \beta_0 + \beta_1 LM0_t + \beta_2 LGDPR_t + \beta_3 LM0_{t-1} + \beta_4 LGDPR_{t-1} + \beta_5 ECT \quad (3.16)$$

Di mana

$DLINF_t$ = Perbedaan pertama terhadap laju inflasi

$DLM0_t$ = Perbedaan pertama terhadap uang primer

$DLGDPRT$ = Perbedaan pertama terhadap Produk Domestik Bruto Riil

$LM0_{t-1}$ = Uang primer kuartal sebelumnya

$LGDPR_{t-1}$ = Produk Domestik Bruto Riil kuartal sebelumnya

ECT = *Error Correction Term* ($LM0_{t-1} + LGDPR_{t-1} - LINF_t$)

Estimasi jangka panjang ECM :

Untuk memperoleh besaran dari simpangan baku koefisien regresi jangka panjang dalam model ECM:

$$DLINF_t = \beta_0 + \beta_1 LM0_t + \beta_2 LGDPR_t + \beta_3 LM0_{t-1} + \beta_4 LGDPR_{t-1} + \beta_5 ECT$$

Di mana:

$$\alpha_0 = \beta_0 / \beta_5$$

$$\alpha_1 = (\beta_3 + \beta_5) / \beta_5$$

$$\alpha_2 = (\beta_3 + \beta_5) / \beta_5$$

Selain mengestimasi besar koefisien dalam jangka panjang, perlu juga diperhitungkan nilai t hitung jangka panjang dari masing-masing koefisien. Untuk mengetahui besar t hitung tersebut, sebelumnya harus diketahui terlebih dahulu besar varians dari masing-masing variabel independen. Varians dari variabel-variabel didapat dari matrik varians-kovarians antar variabel *independen* dalam regresi jangka pendek dengan formula dibawah ini (Insukindro, 1990):

$$\text{Var}(\alpha_0) = \alpha_0 V^T(\beta_5, \beta_0)$$

$$\alpha_0^T = [d\alpha_0/d\beta_0 \quad d\alpha_0/d\beta_5] = [1/d\beta_5 \quad -\alpha_0/d\beta_5]$$

$$\text{Var}(\alpha_1) = \alpha_1 V^T(\beta_5, \beta_1) \alpha_1$$

$$\alpha_1^T = [d\alpha_1/d\beta_1 \quad d\alpha_1/d\beta_5] = [1/d\beta_5 \quad -(\alpha_{1-1})/\beta_5]$$

$$\text{Var}(\alpha_2) = \alpha_2 V^T(\beta_5, \beta_2) \alpha_2$$

$$\alpha_2^T = [d\alpha_2/d\beta_2 \quad d\alpha_2/d\beta_5] = [1/d\beta_5 \quad -(\alpha_{2-1})/\beta_5]$$

Setelah melakukan perhitungan varians masing-masing variabel *independen*, nilai t hitung jangka panjang dapat diperoleh dengan membagi antara nilai koefisien jangka panjang dan *standard error* yang diperoleh dari akar varians masing-masing variabel *independen* tersebut.

3.3.3. Uji Penyimpangan Asumsi Klasik

3.3.3.1. Autokorelasi

Autokorelasi menunjukkan adanya korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu (seperti dalam deret waktu) atau suatu ruang (seperti data dalam *cross sectional*). Dalam model regresi linear klasik mengasumsikan autokorelasi seperti itu tidak terdapat dalam *disturbance* atau gangguan u_t . Tetapi jika terdapat ketergantungan seperti itu, kita mempunyai korelasi. Sehingga parameter yang diestimasi menjadi bias dan variansinya tidak lagi minimum dan model menjadi tidak efisien. Dengan menggunakan lambang :

$$E(u_i, u_j) \neq 0 \quad i \neq j$$

Dalam penelitian ini, untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi dalam model digunakan uji Breusch-Godfrey (*Breusch-Godfrey Test*). Uji ini mengasumsikan bahwa faktor pengganggu, U_t , diturunkan dengan mengikuti ρ *th-order autoregressive scheme* di mana persamaan tersebut adalah diturunkan dari model awal.

$$U_t = \rho_1 U_{t-1} + \rho_2 U_{t-2} + \dots + \rho_p U_{t-p} + e_t \quad (3.17)$$

Di mana e_t merupakan faktor pengganggu dengan rata-rata nol (*zero mean*) dan dengan varian yang konstan. Lebih lanjut, dengan persamaan 3.17 mengasumsikan bahwa ketika melakukan regresi, konstanta atau *intercept* tidak dimasukkan dalam model regresi persamaan 3.17 sehingga model regresi yang dilakukan adalah regresi yang melewati titik origin.

Untuk dapat menerapkan uji B-G, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan, yaitu (Gujarati, 1995):

1. Lakukan regresi atau estimasi dengan menggunakan model empiris yang sedang diestimasi, kemudian dapatkan nilai residual.
2. Lakukan regresi dengan menggunakan persamaan 3.14
3. Lakukan uji hipotesis nol (H_0) : $\rho_1 = \rho_2 = \dots = \rho_p = 0$

Jika $(n-p) \cdot R^2 = \chi^2$ –hitung melebihi nilai χ^2 –hitung, maka hipotesis nol ditolak, dan sebaliknya bila χ^2 –hitung lebih kecil dibandingkan nilai χ^2 –hitung, maka hipotesis nol tidak dapat ditolak.

3.3.3.2. Multikolinearitas

Multikolinearitas merupakan suatu keadaan di mana satu atau lebih variabel bebas terdapat korelasi dengan variabel bebas lainnya, atau dengan kata lain suatu variabel bebas merupakan fungsi linear dari variabel bebas lainnya.

Untuk menguji ada atau tidaknya multikolinearitas pada model, peneliti menggunakan metode korelasi parsial (*examination of partial correlation*). Metode ini disarankan oleh Farrar dan Glauber (1967) dalam Firmansyah (2001). Metode ini membandingkan koefisien-koefisien korelasi yang dihasilkan dengan nilai koefisien

determinasi (R^2). Hipotesis yang digunakan menyatakan, apabila kuadrat dari koefisien korelasi lebih kecil daripada koefisien determinasi maka dalam model tidak dijumpai adanya masalah multikolinearitas dan sebaliknya.

3.3.3.3. Heteroskedastisitas

Yaitu pengujian untuk melihat apakah kesalahan pengganggu mempunyai varians yang sama atau tidak. Hal tersebut dilambangkan sebagai berikut:

$$E(u_i^2) = \sigma^2$$

di mana:

$$\sigma^2 = \text{varians}$$

$$I = 1, 2, 3, \dots, N$$

Jika terjadi heteroskedastisitas maka walaupun penaksir tersebut tetap tidak bias dan konsisten, namun tidak efisien (minimum) baik dalam sampel besar maupun kecil. Dalam penelitian ini, untuk mengetahui ada atau tidaknya gangguan heteroskedastik pada model, peneliti menggunakan uji Park (*Park Test*). Menurut Gujarati (1995) langkah-langkah yang harus dilakukan:

- a) Park mengemukakan metode bahwa σ^2 merupakan fungsi dari variabel-variabel bebas, yang dinyatakan sebagai berikut:

$$\sigma^2_i = \alpha X_i^{\beta_i}$$

- b) Persamaan ini dijadikan linier dalam bentuk persamaan logaritma sehingga menjadi:

$$\ln \sigma^2_i = \alpha + \beta X_i + V_i$$

- c) Karena σ^2_i umumnya tidak diketahui, maka ini dapat ditaksir dengan menggunakan u^2 sebagai proksi sehingga:

$$\ln u^2_i = \alpha + \beta X_i + V_i$$

Hasil: jika variabel bebas signifikan mempengaruhi variabel terikat, berarti ada heteroskedastisitas.

3.3.4. Uji Statistik

3.3.3.4.1. Uji Kebaikan Suai (*Goodness of Fit*)

Uji kebaikan suai ini dengan melihat koefisien determinasi (R^2). Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel *dependen*. Nilai koefisien determinasi adalah di antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel *independen* dalam menjelaskan variabel *dependen* amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel *independen* memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel *dependen* (Imam Ghozali, 2001).

3.3.4.2. Uji F

Yaitu pengujian untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel-variabel *independen* terhadap variabel *dependen* secara bersama-sama. Langkah-langkahnya:

a) Menentukan hipotesis sebagai berikut:

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = 0$$

$$H_a : \beta_1 \neq \beta_2 \neq 0$$

b) Menentukan nilai F hitung dengan rumus

$$F_{\text{test}} = \frac{\text{ESS}/(k-1)}{\text{RSS}/(N-k)}$$

keterangan :

ESS = Jumlah kuadrat yang dijelaskan

RSS = Jumlah kuadrat residual

k = Jumlah variabel

N = Jumlah data

- c) Menentukan tingkat signifikansi sehingga diperoleh nilai F tabel. Kemudian membandingkan nilai F hitung dengan F tabel pada $\alpha = 5\%$.
- d) Kriteria pengujian:
- Jika $|F \text{ hitung}| < F \text{ tabel } (\alpha = 5\%)$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak yang berarti variabel *independen* tidak mempengaruhi variabel *dependen* secara signifikan.
 - Jika $|F \text{ hitung}| > F \text{ tabel } (\alpha = 5\%)$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti variabel *independen* mempengaruhi variabel *dependen* secara signifikan.

3.3.4.3. Uji t

Yaitu pengujian untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel *independen* terhadap variabel *dependen*. Langkah-langkahnya:

- a) Menentukan hipotesis sebagai berikut:

$$H_0 : \beta_i = 0$$

$$H_a : \beta_i \neq 0$$

- b) Menentukan nilai t hitung, dengan rumus:

$$t_{\text{hitung}} = \frac{\beta_i}{\text{Se}(\beta_i)}$$

keterangan :

β_i = koefisien regresi variabel i

Se = *standard error*

- c) Menentukan tingkat signifikansi sehingga diperoleh nilai t tabel.
- d) Kemudian membandingkan nilai t hitung dengan t tabel pada $\alpha = 5\%$.

e) Kriteria pengujian:

- Jika $\left| t \text{ hitung} \right| < t \text{ tabel } (\alpha = 5\%)$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak yang berarti variabel *independen* tidak mempengaruhi variabel *dependen* secara signifikan.
- Jika $\left| t \text{ hitung} \right| > t \text{ tabel } (\alpha = 5\%)$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti variabel *independen* mempengaruhi variabel *dependen* secara signifikan.

BAB IV

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN MONETER, PERKEMBANGAN UANG PRIMER, PRODUK DOMESTIK BRUTO RIIL DAN LAJU INFLASI DI INDONESIA

4.1. Tinjauan Historis Kebijakan Moneter di Indonesia

Wacana tentang peran yang harus dimainkan oleh suatu bank sentral dalam perekonomian telah menjadi perdebatan sejak lama. Perdebatan tersebut dilatarbelakangi baik oleh berkembangnya pemikiran di kalangan teoritis maupun di kalangan praktisi bank sentral sejalan dengan perekonomian yang juga semakin berkembang. Di Indonesia misalnya, operasional kebijakan moneter dalam tiga dasawarsa terakhir berkembang ke arah penggunaan instrumen moneter yang bersifat tidak langsung dengan lebih mengandalkan kepada peran pasar keuangan. Tahun 1983 dapat dipandang sebagai suatu permulaan dalam perkembangan ini, di mana jargon deregulasi dan debirokratisasi seolah menjadi kata kunci dalam pengelolaan perekonomian (Syahril Sabirin, 2002).

Pelaksanaan kebijakan moneter pada periode sebelum krisis sangat mengandalkan pada uang primer sebagai sasaran operasional dengan target nilai tukar nominal sebagai jangkar (*anchor*) kebijakan. Dalam hal ini, nilai tukar dikendalikan secara ketat dalam kisaran yang sempit dan didepresiasi dengan laju yang relatif konstan (sistem kurs mengambang terkendali). Sementara itu, sasaran akhir kebijakan moneter Bank Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 13 tahun 1968 mengenai bank sentral belum terfokus. Selain tingkat inflasi yang rendah, dan keseimbangan neraca pembayaran (Syahril Sabirin, 2002).

Dengan sasaran akhir yang beragam, kebijakan moneter sulit untuk dilakukan secara

terfokus. Selain itu secara operasional, kebijakan moneter yang mengandalkan pada uang primer juga punya masalah. Meski pendekatan kuantitas (agregat moneter) dapat dianggap efektif selama kurun waktu yang cukup lama, khususnya sejak awal tahun 1990-an pendekatan tersebut mendapat tantangan yang cukup berat. Perkembangan yang sangat cepat di pasar uang akibat serangkaian deregulasi dan semakin terintegrasinya perekonomian domestik dengan luar negeri menyebabkan hubungan antara agregat moneter dengan *output* dan inflasi menjadi tidak stabil. Akibatnya, kebijakan moneter berdasarkan pendekatan kuantitas menjadi berkurang efektifitasnya. Menghadapi tantangan tersebut, Bank Indonesia kemudian mengadopsi kerangka kebijakan yang bersifat pragmatis (*eclectic approach*). Tanpa meninggalkan pendekatan kuantitas, perhatian atas perkembangan suku bunga semakin ditingkatkan. Sementara kisaran intervensi dalam kerangka *managed exchange rate regime* semakin diperlebar untuk mengurangi beban kebijakan moneter (Syahril Sabirin, 2002).

Tekanan yang luar biasa terhadap nilai tukar dan cadangan devisa di awal krisis 1997 memaksa Bank Indonesia dan pemerintah melepas *band* intervensi dan menganut sistem nilai tukar mengambang bebas. Akibatnya, nilai tukar tak lagi menjadi jangkar nominal kebijakan moneter. Depresiasi kurs yang teramat tajam dan suku bunga yang tinggi membuat sektor riil dan sektor perbankan, yang ternyata sangat rapuh, semakin terpuruk. Perbankan kehilangan kepercayaan publik. Kegiatan usaha tidak bergerak, produksi merosot dan jumlah pengangguran melonjak (Syahril Sabirin, 2002).

Untuk mencegah kehancuran sistem perbankan secara keseluruhan karena nasabah menarik sebagian besar atau seluruh simpanannya secara bersamaan, Bank Indonesia terpaksa memainkan fungsinya sebagai penjaga gawang terakhir: *the lender of last resort*. Pinjaman kepada bank-bank yang kesulitan likuiditas, lebih dikenal sebagai “Bantuan “

Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), terpaksa diberikan dalam jumlah yang sangat besar sejak akhir 1997. Akibatnya dari sisi moneter, uang beredar meningkat tajam. Dengan sangat rendahnya faktor kepercayaan, tingginya peningkatan uang beredar tersebut turut pula memberikan andil pada menguatnya tekanan terhadap nilai mata uang rupiah: nilai tukar rupiah melemah dan harga-harga meroket (Syahril Sabirin, 2002).

Pada tahun 1998, kebijakan moneter memasuki periode pengetatan terutama untuk mencegah terjadinya *hyperinflation*, yaitu dengan berupaya menghentikan semua bentuk ekspansi moneter agar tidak terjadi kelebihan likuiditas dalam perekonomian. Bank Indonesia menerapkan kembali kebijakan moneter ketat yang sempat kehilangan kendalinya ketika terpaksa harus menyalurkan pinjaman likuiditas besar-besaran kepada perbankan (Syahril Sabirin, 2002).

Kebijakan moneter dengan sasaran uang primer ini diperkuat dengan serangkaian perbaikan dan inovasi kebijakan. Sistem penalti yang berat atas saldo negatif bank-bank di Bank Indonesia diterapkan untuk mencegah meningkatnya permintaan bank-bank akan pinjaman likuiditas dari Bank Indonesia. Adanya batas suku bunga deposito dan pinjaman antar bank yang dijamin pemerintah, bertujuan mendorong perilaku manajemen operasional perbankan agar berhati-hati sehingga mengurangi resiko mengalirnya pinjaman penyangga likuiditas dari Bank Indonesia. Sistem lelang Sertifikat Bank Indonesia (SBI) melalui operasi pasar terbuka diubah dari target suku bunga menjadi target kuantitas. Kemudian diciptakan instrumen “intervensi rupiah” sebagai alat kontraksi dan ekspansi tambahan serta untuk mengurangi gejolak suku bunga di pasar uang (Syahril Sabirin, 2002).

Dalam kerangka sistem nilai tukar mengambang, pergerakan nilai tukar rupiah di pasar menjadi sangat rentan terhadap berbagai sentimen pasar. Untuk mengurangi gejolak

nilai tukar yang berlebihan, kebijakan intervensi Bank Indonesia dilakukan dengan tetap memperhatikan batas terendah (*floor*) *Net International Reserve* (NIR). Sebagaimana diketahui, besarnya NIR aktual tersebut secara mingguan diumumkan kepada masyarakat dan sejauh ini selalu di atas batas terendah. Dalam hubungannya dengan pengelolaan agregat moneter, sterilisasi valas juga berdampak kontraktif terhadap *base money*, sehingga dapat dipandang sebagai suatu instrumen yang dapat membantu operasi pasar terbuka.

Untuk mengantisipasi dampak negatif yang ditimbulkan oleh arus lalu lintas modal yang semakin besar dan fluktuatif, Bank Indonesia telah mengeluarkan berbagai ketentuan yang diharapkan dapat menciptakan pasar valas yang sehat. Dalam hal ini Bank Indonesia sejak lama telah mengeluarkan peraturan pembatasan *forward* jual bank domestik dengan non-residen. Demikian pula untuk mengurangi resiko bank dalam melakukan transaksi valas telah diatur pula ketentuan mengenai *Net Open Position* (NOP). Selain itu, untuk mengurangi kegiatan spekulasi telah pula dikeluarkan ketentuan pembatasan internasionalisasi rupiah.

Terlaksananya suksesi kepemimpinan nasional secara damai dan demokratis telah membentuk sentimen positif para pelaku pasar sehingga telah menurunkan resiko politik di Indonesia. Menurunnya resiko politik diperkuat oleh dukungan lembaga keuangan (IMF/ *World Bank*) dan lembaga pemeringkat internasional (S&P). Perkembangan ini kemudian tercermin pada penguatan nilai tukar di pasar valuta asing dan membaiknya indeks harga saham di pasar modal. Meskipun demikian, perkembangan yang menggembirakan ini belum cukup memadai untuk segera menyimpulkan bahwa nilai tukar akan kembali stabil pada tingkat keseimbangan barunya, apalagi dengan memperhitungkan resiko terakhir yang terkait dengan tragedi *World Trade Center*. Dalam

kaitan ini, agenda pemulihan ekonomi merupakan isu yang masih sangat ditunggu oleh pelaku pasar, karena turunnya berbagai faktor resiko tersebut masih perlu diikuti oleh perbaikan secara nyata pada fundamental ekonomi agar resiko keuangan dan resiko ekonomi yang dihadapi para pelaku pasar benar-benar dapat menurun secara berarti. Dalam kondisi seperti itu, kebijakan moneter harus tetap diarahkan untuk menyerap likuiditas agar sesuai dengan kebutuhan riil perekonomian.

Menghadapi tekanan inflasi dan nilai tukar yang semakin kuat, di tahun 2001, Bank Indonesia telah berupaya untuk meredam tekanan inflasi dan nilai tukar dengan menempuh kebijakan moneter yang cenerung ketat (*tight bias monetary policy*), melalui pengendalian uang primer sesuai sasaran yang telah ditetapkan. Pengendalian uang primer dilakukan melalui Operasi Pasar Terbuka (OPT), khususnya melalui mekanisme lelang SBI baik yang berjangka waktu satu bulan maupun tiga bulan serta melalui instrumen intervensi rupiah.

Dalam perkembangan selanjutnya, mulai awal tahun 2002, laju inflasi yang rendah dan adanya tren penurunan inflasi tahunan serta nilai tukar rupiah yang telah jauh menguat telah memberikan ruang gerak bagi Bank Indonesia untuk memperlonggar kebijakan moneter dan mendorong penurunan suku bunga domestik.

Sementara itu, kondisi moneter selama 2003 menunjukkan perkembangan yang positif dan konsisten dengan upaya pencapaian sasaran inflasi. Kondisi ini tercermin pada terkendalinya uang primer, menguatnya nilai tukar dan menurunnya suku bunga (Syahril Sabirin, 2002).

4.2. Perkembangan Uang Primer di Indonesia

Pada bulan Januari, April, Juli dan November 1999, uang primer berhasil memenuhi sasaran yang ditetapkan, sedangkan pada bulan-bulan lainnya masih berada sedikit di atas sasaran. Pada akhir Desember 1999, jumlah uang primer mencapai Rp.101,8 triliun, lebih tinggi dibandingkan dengan sasarannya sebesar Rp.85 triliun. Pelampauan posisi uang primer dari sasaran yang cukup besar pada akhir tahun, terutama dipengaruhi oleh peningkatan sementara permintaan uang kartal yang disebabkan oleh kekhawatiran yang berkaitan dengan MKT 2000. Dengan kesiapan sistem perbankan dalam menghadapi masalah tersebut, gejala peningkatan permintaan uang kartal diperkirakan akan kembali mereda. Peningkatan uang kartal yang terjadi selama tahun laporan disebabkan pula oleh terjadinya penarikan simpanan perbankan oleh nasabah akibat penundaan pengumuman penutupan bank, pembayaran kepada nasabah bank beku kegiatan usaha (BBKU) secara tunai, motif berjaga-jaga masyarakat berkaitan dengan kondisi sosial politik, dan peningkatan permintaan masyarakat dalam rangka menghadapi hari raya.

Di tengah nuansa optimisme yang cukup kuat yang mengenai prospek ekonomi Indonesia tahun 2000 , sebagaimana tercermin dari proyeksi pertumbuhan ekonomi sebesar 3,0% - 4,0%, nilai tukar rata-rata sebesar Rp.7000 per dolar AS, dan sasaran inflasi (diluar dampak kenaikan harga yang disebabkan oleh kebijakan Pemerintah di bidang harga dan pendapatan) sebesar 3,0% - 5,0%, Bank Indonesia pada tahun laporan menetapkan sasaran pertumbuhan uang primer sebesar 8,3%. Namun dalam perjalanan waktu, upaya mencapai sasaran uang primer tersebut menghadapi banyak tantangan. Tantangan terbesar bersumber lebih kuatnya aktivitas perekonomian dari yang diperkirakan semula, memburuknya ekspektasi inflasi, dan tekanan terhadap rupiah. Disamping itu, pengendalian moneter juga menghadapi kendala yang bersumber dari sisi

operasional sehubungan dengan belum pulihnya fungsi intermediasi perbankan dan meningkatnya ketidakpastian sosial politik dalam negeri. Pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, ekspektasi inflasi yang memburuk, dan rupiah yang melemah tersebut menyebabkan permintaan uang primer yang meningkat.

Di awal 2001, dalam situasi yang lebih optimis terhadap terus berlanjutnya proses pemulihan ekonomi, Bank Indonesia memandang bahwa inflasi yang relatif tinggi pada tahun sebelumnya perlu diarahkan kepada tingkat yang lebih rendah, sebagai prasyarat bagi upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dalam jangka panjang. Berkaitan dengan itu, sasaran inflasi di luar dampak kebijakan pemerintah di bidang harga dan pendapatan ditetapkan sebesar 4,0% - 6,0%. Untuk mencapai sasaran inflasi tersebut, dengan asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 4,5% - 5,5% dan nilai tukar berkisar antara Rp. 7.750 – Rp. 8.250 per dolar AS, Bank Indonesia menetapkan sasaran pertumbuhan uang primer sebesar 11,0% - 12,0% pada akhir 2001, yang lebih rendah dari pertumbuhan akhir tahun sebelumnya yang mencapai 22,3%.

Sasaran kebijakan moneter yang cenderung ketat ini ditempuh dengan tetap berupaya menjaga agar perkembangan uang primer sepanjang tahun 2001 dapat sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Guna mencapai sasaran uang primer tersebut, Bank Indonesia selalu berusaha untuk menyerap kelebihan likuiditas di sektor perbankan yang berpotensi memberikan tekanan terhadap nilai tukar dan inflasi. Kebijakan ini ditempuh terutama melalui Operasi Pasar Terbuka (OPT) dengan instrumen Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan intervensi rupiah. Upaya pengendalian uang primer tersebut juga didukung oleh kebijakan sterilisasi di pasar valuta asing yang diarahkan untuk menyerap ekspansi uang primer yang berasal dari pengeluaran pemerintah dalam rupiah yang dibiayai dari penerimaan luar negeri.

Selama 2002, posisi *test date* uang primer selalu berada di bawah target indikatifnya dengan perbedaan berkisar antara Rp. 1,26 triliun sampai Rp. 7,7 triliun. Dilihat dari posisi akhir Desember 2002, uang primer mencapai Rp. 138,3 triliun atau Rp. 10,5 triliun lebih tinggi dibandingkan dengan posisi akhir Desember 2001 sebesar Rp. 127,8 triliun. Ditinjau dari komponennya, peningkatan uang primer tersebut terutama berasal dari peningkatan uang kartal sebesar Rp. 4,4 triliun dan saldo giro positif bank umum sebesar Rp. 3,4 triliun. Peningkatan uang kartal tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan transaksi masyarakat berkaitan dengan Lebaran, Natal dan Tahun Baru. Sementara itu, peningkatan saldo giro positif bank di BI terutama bersumber dari meningkatnya posisi Giro Wajib Minimum (GWM), seiring dengan peningkatan dana pihak ketiga bank. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pertumbuhan uang kartal selama 2002 mengalami perlambatan. Faktor utama yang mendorong lambatnya pertumbuhan uang kartal selama 2002 adalah berkurangnya permintaan uang kartal untuk tujuan berjaga-jaga. Selain itu, relatif lambatnya pertumbuhan uang kartal 2002 juga disebabkan oleh lebih rendahnya permintaan uang kartal untuk kebutuhan transaksi. Berdasarkan faktor yang mempengaruhinya, peningkatan uang primer terutama bersumber dari lebih besarnya *net* ekspansi rupiah rekening pemerintah dan biaya pengendalian moneter dibandingkan dengan pengaruh kontraksi OPT dan sterilisasi valas.

Pada awal tahun laporan, Bank Indonesia memprakirakan uang primer tumbuh rata-rata sekitar 14,5% selama tahun 2004. Prakiraan tersebut didasarkan pada perkiraan pertumbuhan ekonomi 4,5 – 5 % dan nilai tukar yang diperkirakan secara rata-rata mencapai Rp. 8.500,- per dolar, serta diselaraskan dengan proyeksi inflasi sebesar 5,5%. Dalam realisasinya, uang primer relatif terkendali meskipun sedikit melampaui perkiraan

indikatifnya. Rata-rata pertumbuhan uang primer untuk keseluruhan 2004 mencapai 15,1%, lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Kondisi tersebut tidak terlepas dari lebih tingginya permintaan uang kartal dan kelebihan giro positif perbankan dari prakiraan semula. Tingginya permintaan uang kartal terutama terjadi pada Juni, September dan Desember yang ditengarai terkait erat dengan kegiatan perekonomian dan beberapa kegiatan temporer seperti serangkaian kegiatan pemilu, puasa, hari raya dan tutup tahun. Sementara itu, lebih tingginya posisi kelebihan giro positif perbankan dari kondisi normalnya pada tiga bulan terakhir 2004 diindikasikan terutama bersumber dari faktor berjaga-jaga perbankan terhadap permintaan likuiditas pada akhir tahun dan ketiadaan penempatan kelebihan dana sore hari di Bank Indonesia.

Pada akhir 2004, posisi uang primer mencapai Rp. 1999,4 triliun, atau meningkat Rp. 33 triliun dari posisi akhir 2003. Dari sisi komponen, peningkatan tersebut bersumber dari peningkatan uang kartal dan giro positif perbankan. Uang kartal mengalami percepatan pertumbuhan menjadi rata-rata 19,0% selama 2004, sementara kenaikan posisi giro positif terutama terkait dengan kebijakan kenaikan GWM pada Juli. Dari sisi faktor yang mempengaruhinya, peningkatan uang primer terutama dipengaruhi oleh ekspansi bersih rekening rupiah pemerintah di Bank Indonesia dan biaya pengendalian moneter.

Tabel 4.1
Perkembangan Uang Primer
(Triliun Rupiah)

Tahun	UANG PRIMER				
	Uang Kartal	Kas Bank	Saldo Giro Bank	Saldo Giro Perusahaan & Perorangan	Total
1997	28,4	5,2	12,0	0,4	46,1
1998	41,4	7,1	26,2	0,4	75,1
1999	58,4	14,2	28,1	1,1	10,2
2000	72,4	17,3	33,9	1,9	125,6
2001	76,3	14,9	34,8	1,6	127,8
2002	80,7	17,7	38,2	1,9	138,3
2003	94,5	18,2	52,2	1,5	166,5
2004	109,3	17,6	72,1	0,5	199,4

Sumber: Bank Indonesia, Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia, 1990-2002

4.3. Perkembangan Permintaan Agregat di Indonesia

Krisis ekonomi di Indonesia telah berkembang semakin dalam selama tahun 1998, sebelum memperlihatkan tanda-tanda perbaikan pada triwulan pertama tahun 1999. Pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi sebesar 13,7 % pada tahun 1998 dibandingkan tahun 1997 yang masih mengalami ekspansi 4,9 %. Di sisi permintaan, kontraksi perekonomian yang tajam disebabkan oleh merosotnya permintaan domestik, khususnya konsumsi rumah tangga dan investasi swasta. Pengeluaran konsumsi rumah tangga menurun terutama karena daya beli masyarakat melemah yang disebabkan oleh melemahnya pendapatan riil dan menurunnya nilai kekayaan rumah tangga sebagai akibat krisis yang berkepanjangan.

Gambaran masih lemahnya permintaan agregat sepanjang tahun 1999 tercermin pada pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) riil yang diperkirakan mencatat

pertumbuhan positif 0,2 %, setelah mengalami kontraksi sebesar 13,2 % pada tahun sebelumnya. Peningkatan permintaan agregat hanya terjadi pada pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga dan pemerintah, sedangkan pengeluaran untuk investasi dan permintaan ekspor mengalami kontraksi walaupun dengan laju kontraksi yang semakin melambat. Beberapa faktor yang mempengaruhi kenaikan konsumsi rumah tangga antara lain perkembangan harga yang relatif stabil, tingkat bunga simpanan yang terus menurun, serta nilai tukar rupiah yang cenderung menguat. Konsumsi pemerintah juga mencatat kenaikan, terutama berasal dari kenaikan pengeluaran rutin.

Selama tahun 2000, perekonomian Indonesia menunjukkan proses pemulihan yang semakin mantap dengan sumber pertumbuhan yang semakin seimbang. Seluruh sektor/kegiatan memberikan sumbangan yang positif terhadap pertumbuhan PDB. PDB pada tahun laporan cukup tinggi yakni sebesar 4,8 %, lebih tinggi dari yang diperkirakan pada awal tahun. Dari sisi permintaan, telah terjadi pergeseran motor pertumbuhan ekonomi, dari konsumsi menjadi ekspor dan investasi yang telah memberikan kontribusi yang positif dan signifikan. Berbeda dengan pertumbuhan tahun sebelumnya, di mana konsumsi menjadi satu-satunya kegiatan yang mencatat pertumbuhan positif, pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran pada tahun 2000 disumbang oleh pertumbuhan ekspor, diikuti oleh investasi dan konsumsi. Sumbangan ekspor, investasi dan konsumsi terhadap pertumbuhan PDB masing-masing mencapai 3,9%, 3,6% dan 3,1%. Kuatnya kinerja ekspor dan meningkatnya peran investasi mengindikasikan semakin mantapnya proses pemulihan perekonomian yang terjadi.

Pada tahun 2001 perekonomian Indonesia diperkirakan mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi yakni mencapai 4,5% - 5,5%. Pertumbuhan yang tinggi tersebut terutama diperkirakan akan didukung oleh membaiknya kinerja ekspor, kegiatan investasi, serta

masih kuatnya pengeluaran konsumsi. Sepanjang tahun laporan, pertumbuhan ekonomi terutama bersumber dari kegiatan dalam negeri (*domestic demand*) yang dalam hal ini didorong oleh meningkatnya pengeluaran konsumsi yang cukup tinggi sebesar 6,2%. Sementara itu kinerja investasi dan ekspor mencatat perlambatan yakni masing-masing hanya tumbuh sebesar 4,0% dan 1,9%.

Perekonomian tahun 2002 tumbuh 3,7%, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, namun masih didukung oleh struktur yang seimbang. Perekonomian masih bertumpu pada konsumsi sementara investasi dan ekspor masih belum menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Aktivitas ekonomi yang meningkat tercermin dari meningkatnya permintaan konsumsi baik di sektor rumah tangga maupun di sektor pemerintah, sedangkan kegiatan investasi belum menunjukkan perkembangan yang menggembirakan.

Perekonomian pada tahun 2003 tumbuh 4,1%, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Dari sisi permintaan, pertumbuhan tersebut masih didorong oleh kegiatan konsumsi. Sementara kegiatan investasi dan ekspor masih tumbuh secara terbatas.

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2004 menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2003, bahkan lebih tinggi dari yang diperkirakan oleh sejumlah kalangan. Dengan didukung oleh kebijakan makroekonomi yang cukup akomodatif dan ditopang oleh ekspektasi positif pelaku ekonomi yang semakin kuat, perekonomian Indonesia mampu tumbuh sebesar 5,1%. Pertumbuhan tersebut diikuti oleh sumber pendorong pertumbuhan yang lebih berimbang, dengan kontribusi investasi dan ekspor yang semakin besar. Kenaikan sisi permintaan tersebut memperoleh respon positif dari dunia usaha, sebagaimana tercermin pada peningkatan laju pertumbuhan pada sejumlah sektor ekonomi.

Tabel 4.2
Produk Domestik Bruto Menurut Pengeluaran
(Persen)

Jenis	2000		2001		2002		2003	
	Pert umb uhan	Kont ri busi	Pert umb uhan	Kont ri busi	Pert um buha n	Kont ri busi	Pert um buha n	Kont ri busi
Produk Domestik Bruto (Riil)	4,9	4,9	3,4	3,4	3,7	3,7	4,1	
Menurut	3,9	3,1	4,8	3,7	5,5	4,3	4,6	3,6
Pengeluaran	3,6	2,6	4,4	3,1	4,7	3,3	4,0	2,8
Konsumsi	6,5	0,5	9,0	0,7	12,8	1,0	9,8	0,8
Konsumsi Rumah Tangga	13,8	2,8	7,7	1,7	-0,2	-0,1	1,4	0,3
Konsumsi Pemerintah	26,5	6,4	,9	0,6	-1,2	-0,4	4,0	1,1
Investasi	21,1	4,4	8,1	2,0	-8,3	-2,2	2,0	0,5
Ekspor Barang dan Jasa								
Impor Barang dan Jasa								

Sumber: Bank Indonesia, Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia, 2000-2003

4.4. Perkembangan Tingkat Inflasi di Indonesia

Laju infasi IHK Indonesia selama tahun 1998 adalah sebesar 77,63%. Inflasi tertinggi sepanjang tahun 1998 terjadi pada kelompok bahan makanan yaitu mencapai 118,37%. Diikuti berturut-turut oleh kelompok sandang (98,69%), kelompok makanan jadi/ minuman/ rokok dan tembakau (94,32%), kelompok kesehatan (86,14%), kelompok transportasi dan komunikasi (55,55%), kelompok perumahan (47,47%) dan kelompok pendidikan/ rekreasi dan olah raga (38,01%).

Secara keseluruhan, laju inflasi IHK selama tahun 1999 menunjukkan penurunan yang cukup besar dari tahun sebelumnya, disumbang oleh perbaikan sisi penawaran jangka pendek dan sumbangan yang besar dari penurunan laju inflasi inti. Tekanan-tekanan laju inflasi hanya meningkat pada triwulan pertama dan keempat tahun laporan, yang timbul berkaitan dengan meningkatnya permintaan masyarakat dalam menghadapi perayaan hari-hari besar keagamaan.

Dalam triwulan I/ 1999, laju inflasi IHK mencapai 4,05% dibanding 1,23% pada triwulan sebelumnya. Tingginya laju inflasi di awal tahun laporan terutama disebabkan oleh faktor musiman, yaitu bulan Ramadhan dan hari raya Idul Fitri yang tercermin dari tingginya laju inflasi kelompok makanan. Pada akhir triwulan I/ 1999, tekanan-tekanan kenaikan harga mulai melemah. Melemahnya tekanan kenaikan harga berlanjut hingga triwulan II dan III/ 1999, sehingga terjadi deflasi masing-masing sebesar 1,30% dan 2,66%. Hal ini merupakan penurunan harga yang sangat tajam jika dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya yang mencatat laju inflasi sebesar masing-masing 14,58% dan 18,61%. Perbaikan sisi penawaran jangka pendek merupakan penyebab utama menurunnya harga-harga tersebut, dengan mencukupinya pasokan bahan makanan oleh pemerintah, perbaikan produksi sektoral, dan kelancaran distribusi barang-barang yang ditunjang oleh kondisi keamanan yang membaik. Membaiknya pasokan bahan makanan juga disumbang oleh keberhasilan panen padi dan palawija, yang mendorong deflasi dalam kelompok bahan makanan, misalnya beras, gula, bumbu-bumbuan, sayur mayur dan makanan jadi/

Pada triwulan IV/ 1999, laju inflasi kembali meningkat dan mencapai 2,06%. Laju inflasi tersebut bahkan lebih tinggi dari laju inflasi triwulan yang sama tahun 1998 yang hanya sebesar 1,23%. Peningkatan harga triwulan/ 1999 terjadi pada semua kelompok

barang dengan penyumbang terbesar datang dari kelompok bahan makanan, makanan jadi dan sandang. Faktor utama yang mendorong peningkatan harga pada ketiga kelompok tersebut adalah gejolak temporer yang berkaitan dengan datangnya bulan Ramadhan, haru raya Natal, dan tahun baru yang hampir bersamaan.

Berdasarkan sumbangan kelompok barang dalam tahun 1999, kelompok bahan makanan menyumbang deflasi sebesar 1,51% menurun tajam dari sumbangan kenaikan harga tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 25,9%. Sementara itu, sumbangan inflasi kelompok-kelompok lainnya relatif rendah jika dibandingkan sumbangan inflasi oleh kelompok yang sama pada tahun sebelumnya. Kelompok makanan jadi, minuman rokok, dan tembakau menyumbang kenaikan harga sebesar 0,62%; perumahan 1,24%; sandang 0,56%; pendidikan, rekreasi dan olah raga 0,38%; kesehatan 0,1% serta transportasi dan komunikasi 0,53%.

Sementara itu, perkembangan harga-harga selama tahun 2000 mendapat tekanan yang berat sejalan dengan meningkatnya kegiatan ekonomi, adanya kebijakan pemerintah di bidang harga dan pendapatan, melemahnya nilai tukar rupiah dan meningkatnya ekspektasi inflasi. Berbagai faktor tersebut telah menyebabkan laju inflasi IHK tahun 2000 mencapai 9,35% lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 2,01%.

Harga-harga barang dan jasa selama 2001 mengalami tekanan yang lebih berat dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi itu tercermin dari inflasi IHK yang mencapai 12,55%, lebih tinggi dari inflasi IHK 2000 sebesar 9,35%. Faktor penyebab tingginya laju inflasi pada 2001 ini adalah kebijaksanaan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada pertengahan Juni 2001 yang diikuti oleh kenaikan tarif dasar listrik dan kenaikan pulsa telepon. Secara bulanan, inflasi IHK terjadi pada 11 bulan kecuali

pada Agustus yang mencatat deflasi. Inflasi bulanan tertinggi terjadi pada Juli sebesar 2,12%. Penyumbang terbesar terhadap inflasi IHK adalah kelompok bahan makanan yaitu sebesar 3,17%, disusul kelompok perumahan 3,07% serta kelompok makanan jadi, minuman dan rokok 2,65%. Sementara itu sumbangan terkecil berasal dari kelompok kesehatan sebesar 0,44%.

Laju inflasi 2002 mengalami penurunan seiring dengan menguatnya nilai tukar, dan membaiknya ekspektasi inflasi masyarakat, sedangkan permintaan belum memberikan tekanan yang signifikan.

Pada semester pertama 2002, laju inflasi menunjukkan kecenderungan yang menurun. Hal ini terutama disebabkan oleh menguatnya nilai tukar rupiah dan membaiknya ekspektasi inflasi. Nilai tukar rupiah dalam periode tersebut mengalami apresiasi yang cukup besar dan disertai oleh volatilitas yang rendah sehingga menurunkan tekanan inflasi yang bersumber dari sisi eksternal. Pengaruh menguatnya nilai tukar rupiah terhadap inflasi antara lain tercermin dari perkembangan inflasi kategori traded yang turun cukup tajam pada pertengahan tahun laporan. Selain faktor menguatnya nilai tukar rupiah, penurunan inflasi juga dipengaruhi oleh membaiknya ekspektasi inflasi. Hal ini tercermin dari hasil survei konsumen yang antara lain mengukur ekspektasi masyarakat atas perkembangan harga pada periode 6 s.d. 12 bulan ke depan. Hasil survei mengindikasikan bahwa ekspektasi inflasi konsumen cenderung membaik yang antara lain dipicu oleh menguatnya nilai tukar rupiah dan harapan membaiknya kondisi ekonomi.

Penurunan inflasi juga ditunjang oleh terjaganya pasokan kebutuhan pokok masyarakat khususnya beras. Operasi pasar beras yang dilakukan Bulog dan ditunjang oleh melimpahnya beras impor telah menyebabkan turunnya harga beras. Harga beras

yang sempat mencapai level yang cukup tinggi pada awal 2002, secara bertahap mengalami penurunan mencapai Rp. 2.790 per kg. Pada akhir tahun laporan, stok beras Bulog mencapai 1, 75 juta ton atau masih cukup untuk memenuhi kebutuhan distribusi rutin sekitar tujuh bulan.

Laju penurunan inflasi pada semester 2002 sedikit terhambat oleh adanya kebijakan pemerintah di bidang harga dan pendapatan. Kebijakan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), tarif telepon dan Tarif Dasar Listrik (TDL) pada periode tersebut tidak hanya meningkatkan harga BBM dan tarif listrik tetapi juga mendorong kenaikan faktor barang dan jasa lainnya akibat kenaikan faktor biaya (*cost push*) dan meningkatnya ekspektasi inflasi yang menyertai kenaikan harga yang ditetapkan pemerintah tersebut.

Pada semester kedua 2002, penurunan inflasi sedikit tertahan. Kondisi ini terutama terkait dengan faktor musiman yakni menghadapi perayaan hari besar keagamaan, berlanjutnya kenaikan *administered prices*, dan meningkatnya ekspektasi inflasi. Sebagaimana periode-periode sebelumnya, tekanan inflasi yang terjadi menjelang hari raya keagamaan dan akhir tahun cenderung tinggi.

Sementara itu, kebijakan pemerintah di bidang harga yang memberikan sumbangan cukup besar terhadap kenaikan inflasi pada semester kedua tahun laporan antara lain berasal dari kenaikan tarif listrik, kenaikan BBM, kenaikan Harga Jual Eceran (HJE) rokok, dan kenaikan harga LPG. Faktor lainnya yang menyebabkan tertahannya penurunan inflasi pada akhir 2002 adalah mulai memburuknya ekspektasi inflasi. Hasil survei menunjukkan ekspektasi konsumen pada kuartal terakhir 2002 cenderung meningkat yang dipicu oleh kenaikan *administered price*, meningkatnya tekanan depresiasi nilai tukar rupiah pasca tragedi bom Bali, serta faktor musiman yang terkait dengan perayaan keagamaan dan tahun baru. Selain mempengaruhi ekspektasi inflasi

konsumen, berbagai perkembangan tersebut juga turut memicu meningkatkan ekspektasi inflasi pedagang.

Berdasarkan hasil survei penjualan eceran, ekspektasi inflasi pedagang yang meningkat di akhir 2002 terutama dipicu oleh kenaikan *administered prices*. Di samping itu, adanya faktor musiman dan kecenderungan dari pedagang untuk memanfaatkan momentum perayaan keagamaan dan tahunbaru dengan menaikkan harga telah mendorong peningkatan ekspektasi inflasi pedagang.

Berdasarkan kelompoknya, sumbangan tertinggi inflasi 2002 terjadi pada kelompok perumahan yang diikuti oleh kelompok bahan makanan, kelompok transpor dan komunikasi serta kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau. Sementara kelompok yang memberikan sumbangan terendah adalah kelompok sandang. Tingginya sumbangan inflasi kelompok perumahan terutama karena dalam kelompok ini terdapat sub kelompok biaya tempat tinggal di mana di dalamnya termasuk tarif listrik, sewa rumah dan upah pembantu, yang pada tahun laporan mengalami kenaikan cukup tinggi.

Secara umum kenaikan harga pada tahun 2003 lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Besarnya inflasi tahun 2003 sebesar 5,06%. Kelompok yang mengalami kenaikan indeks tertinggi pada tahun 2003 adalah kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga dan kelompok perumahan masing-masing sebesar 11,71% dan 9,21%.

Perkembangan harga-harga barang dan jasa di tingkat konsumen selama 2004 relatif masih terkendali, meskipun cenderung meningkat bila dibandingkan dengan 2003. Inflasi IHK 2004 mencapai 6,40% (y-oy), lebih tinggi bila dibandingkan dengan inflasi IHK 2003 sebesar 5,06% (y-o-y). Peningkatan inflasi tersebut tercermin pada perkembangan inflasi bulanan pada 2004 yang secara rata-rata lebih tinggi bila dibandingkan inflasi

bulanan pada 2003. Meskipun demikian, pola musiman inflasi 2004 tidak berubah banyak dari 2003 ketika inflasi cenderung meningkat pada akhir tahun sehubungan dengan adanya perayaan hari raya idul fitri. Inflasi bulanan tertinggi terjadi pada Desember- yaitu sebesar 1,04%- disebabkan antara lain oleh kenaikan harga elpiji dan dampak psikologis rencana kenaikan harga BBM pada 2005. Sebaliknya inflasi terendah terjadi pada Februari yang mencatat deflasi sebesar 0,02% disebabkan oleh mulai masuknya musim panen, khususnya untuk komoditi sayur-mayur.

Dilihat dari sumbangannya, kelompok barang yang memberikan andil terbesar terhadap inflasi selama 2004 adalah kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar yang mencapai 2,04%. Selanjutnya, kelompok bahan makanan dan kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau memberikan sumbangan inflasi yang lebih rendah yaitu masing-masing sebesar 1,51% dan 0,86%. Dalam kelompok perumahan, jenis barang dan jasa yang dominan menyumbang inflasi adalah tarif kontrak dan sewa rumah. Dalam kelompok bahan makanan, penyumbang inflasi tertinggi adalah beras dan bumbu-bumbuan. Sementara itu, penyumbang inflasi terbesar dalam kelompok makanan jadi adalah gula pasir dan mi. Apabila dilihat berdasarkan kenaikan harga, kelompok bahan makanan dan kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan mencatat inflasi yang lebih tinggi dari 2003, sementara itu, kelompok barang lainnya mengalami inflasi yang lebih rendah.

Tabel 4.3
Laju Inflasi Indonesia Menurut Kelompok Barang Kebutuhan
1997-2003 (Persen)

Tahun	Bahan Makanan	Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau	Perumahan	Sandang	Kesehatan	Pendidikan Rekreasi & Olahraga	Transportor & Komunikasi	Umm
1997	18,45	-	6,08	7,67	8,11	-	-	-
1998	118,37	94,32	47,47	98,69	86,14	38,01	-	11,05
1999	-5,25	3,60	5,23	6,54	3,87	5,29	-	77,63
2000	4,00	11,08	10,10	10,19	9,57	17,51	55,55	2,01
2001	12,03	14,48	13,59	8,14	8,92	11,90	5,15	9,53
2002	9,13	9,18	12,71	2,69	5,63	10,85	12,66	12,55
2003	-1,72	6,24	9,21	7,09	5,67	11,71	14,16	10,03
							15,52	5,06
							4,10	

Sumber: Badan Pusat Statistik, Laporan Perekonomian Indonesia, 1997-2003

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Analisis Perilaku Data

Isu penting menyangkut regresi dengan menggunakan data runtut waktu adalah masalah stasioneritas. Regresi yang melibatkan dua atau lebih data runtut waktu yang tidak stasioner akan menghasilkan regresi lancung (*Spurious regression*). Oleh karena itu sebelum analisis regresi dilakukan perlu dilakukan terlebih dahulu uji stasioneritas, apakah data pada derajat nol I (0) stasioneritas atau tidak. Prosedur uji yang digunakan untuk menguji stasioneritas data adalah uji Dickey-Fuller (DF) dan Augmented Dickey Fuller (ADF).

Uji ini dimulai dengan uji akar-akar unit, uji derajat integrasi dan uji kointegrasi. Jika pada uji akar-akar belum stasioner maka dilanjutkan dengan uji derajat integrasi sampai variabel atau data tersebut stasioner. Kemudian setelah seluruh variabel memiliki derajat yang sama, maka dapat dilakukan uji kointegrasi.

5.1.1. Uji Akar-akar Unit (*Unit Root Test*)

Berdasarkan hasil estimasi uji akar-akar unit tabel 5.1, tidak semua variabel-variabel yang digunakan pada penelitian ini memiliki nilai DF dan ADF hitung lebih besar dibandingkan nilai kritisnya (*Mackinnon critical values*). Pada uji DF, semua variabel tidak signifikan pada $\alpha = 5\%$. Sedangkan pada uji ADF, hanya variabel laju inflasi (LINF) saja yang signifikan pada $\alpha = 5\%$. Karena belum stasioner pada derajat nol, maka perlu dilakukan uji stasioneritas lagi dengan menggunakan uji derajat integrasi satu.

Tabel 5.1
Hasil Uji Akar-akar Unit

Variabel	Uji	Nilai Hitung	Nilai kritis ($\alpha = 5\%$)	Kesimpulan
LINF	DF	0,069998	-3,0199	Tidak Signifikan Signifikan
	ADF	-4,164948	-3,6591	
LM0	DF	-2,880960	-3,0199	Tidak Signifikan Tidak Signifikan
	ADF	-0,159109	-3,6591	
LGDPR	DF	0,283910	-3,0199	Tidak Signifikan Tidak Signifikan
	ADF	-3,164577	-3,6591	

Sumber: Data Penelitian yang Diolah dengan Program Eviews 3.0, 2005

5.1.2. Uji Derajat Integrasi

Jika data pada derajat nol (0) tidak stasioner, terlebih dahulu data tersebut harus distasionerkan. Metode yang digunakan untuk membuat data menjadi stasioner adalah *differencing*. Uji derajat integrasi pada prinsipnya tidak berbeda dengan uji akar-akar unit. Pada derajat integrasi, variabel-variabel pengamatan dideferensikan sampai derajat tertentu hingga diperoleh kondisi yang stasioner.

Tabel 5.2
Hasil Uji Derajat Integrasi Derajat Satu

Variabel	Uji	Nilai Hitung	Nilai kritis ($\alpha = 5\%$)	Kesimpulan
LINF	DF	-4,326319	-3,0294	Signifikan Signifikan
	ADF	-4,167617	-3,6746	
LM0	DF	-2,891037	-3,0294	Signifikan pada $\alpha = 10\%$ Signifikan
	ADF	-4,496295	-3,6746	
LGDPR	DF	-5,383158	-3,0294	Signifikan Signifikan
	ADF	-4,995669	-3,6746	

Sumber: Data Penelitian yang Diolah dengan Program Eviews 3.0, 2005

Berdasarkan tabel 5.2, variabel laju inflasi (LINF), uang primer (LM0) dan Produk Domestik Bruto Riil (LGDPRI) telah stasioner pada derajat yang sama, yaitu derajat satu, yang ditunjukkan dari angka DF dan ADF yang lebih besar dibandingkan nilai kritisnya (*Mackinnon critical values*) pada $\alpha = 5\%$, kecuali DF hitung variabel uang primer (LM0) yang signifikan pada $\alpha = 10\%$. Dengan demikian, uji kointegrasi yang mensyaratkan kestasioneran data pada derajat yang sama bisa digunakan.

5.1.3. Uji Kointegrasi

Uji kointegrasi merupakan salah satu bentuk uji dalam model dinamis yang bertujuan untuk mengetahui kemungkinan adanya hubungan jangka panjang diantara variabel-variabel pengamatan.

Tabel 5.3
Hasil Uji Kointegrasi

Uji	Nilai Hitung	Nilai kritis ($\alpha = 5\%$)	Kesimpulan
CRDW	0,884856	0,78	Signifikan

Sumber: Data Penelitian yang Diolah dengan Program Eviews 3.0, 2005

Berdasarkan tabel 5.3, nilai CRDW hitung lebih besar dari nilai kritis, sehingga bisa disimpulkan bahwa model empiris yang digunakan dalam penelitian ini lolos uji kointegrasi, sehingga hasil ini mengindikasikan bahwa model regresi ini konsisten dalam jangka pendek dan panjang.

5.2. Estimasi ECM (*Error Correction Model*)

5.2.1. Hasil Estimasi ECM dalam Jangka Pendek

Berikut ini merupakan hasil estimasi model regresi dinamis dengan ECM, di mana model regresi ini bisa dioptimalisasikan setelah memenuhi persyaratan stasioneritas data

Tabel 5. 4
Hasil Estimasi *Error Correction Model (ECM)* Jangka Pendek

Variabel	Koefisien	t-statistik	Probabilitas
C	-1,235348	-1,456328	0,1635
DLM0	0,019267	0,319096	0,7535
DLGDPR	0,675749	2,030223	0,0583
BLM0	-0,430952	-4,305092	0,0005
BLGDPR	0,322531	1,360388	0,1915
ECT	0,461572	4,428063	0,0004
R-squared	= 0,630297		
Adjusted R-squared	= 0,521561		
Durbin-Watson stat	= 1,317426		
F-statistic	= 5,796581		
Prob(F-statistic)	= 0,002661		

*Sumber: Data Penelitian yang Diolah dengan Program
Eviews 3.0, 2005*

Persamaan *Error Correction Model (ECM)* untuk periode jangka pendek adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{DLINF} = & -1,235348 + 0,019267 \text{ DLM0} + 0,675749 \text{ DLGDPR} - 0,430952 \text{ BLM0} \\ & + 0,322531 \text{ BLGDPR} + 0,461572 \text{ ECT} \end{aligned}$$

Berdasarkan tabel di atas, nilai koefisien *Error Correction Term (ECT)* lebih besar dari nol dan kurang dari satu yaitu 0,461572 dan signifikan pada $\alpha = 1\%$. Sehingga bisa disimpulkan bahwa analisis ECM pada penelitian ini sah untuk digunakan.

5.2.2. Hasil Estimasi ECM dalam Jangka Panjang

Jangka panjang merupakan suatu periode yang memungkinkan untuk mengadakan penyesuaian penuh untuk setiap perubahan yang timbul, sehingga dapat menunjukkan sejauh mana perubahan pada variabel *independen* menyesuaikan secara penuh terhadap variabel *dependen*.

Tabel 5.5
Hasil Estimasi *Error Correction Model* (ECM) Jangka Panjang

Variabel	Koefisien	t-Hitung
C	-2,67639	-0,550818
LM0	0,066338	0,4266855
LGDP	1,6987642	4,3511087

Sumber: Data Penelitian yang Diolah dengan Program
Eviews 3.0, 2005

Persamaan *Error Correction Model* (ECM) untuk periode jangka panjang adalah sebagai berikut:

$$\text{INFLASI} = -2,67639 + 0,066338 \text{ LM0} + 1,6987642 \text{ LGDPR}$$

5.3. Pengujian Penyimpangan Asumsi Klasik

5.3.1. Autokorelasi

Autokorelasi menunjukkan adanya korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu (seperti dalam deret waktu) atau suatu ruang (seperti dalam data *cross sectional*). Dalam penelitian ini, untuk mengetahui ada tidaknya Autokorelasi dalam model digunakan uji Breusch-Godfrey.

Tabel 5.6
Pengujian Autokorelasi dengan *Breusch-Godfrey Test*

<i>Breusch-Godfrey Test</i>			
F Statistik	Probabilitas	Obs* R-Squared	Probabilitas
1,598881	0,233846	9,196137	0,101492

Sumber: Data Penelitian yang Diolah dengan Program Eviews 3.0, 2005

Berdasarkan tabel di atas, $obs \cdot R\text{-squared}$ atau χ^2 hitung = 9,196137 lebih kecil dari χ^2 tabel ($df = 5, \alpha = 5 \%$) = 11,0705, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi dalam model.

5.3.2. Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas merupakan suatu pengujian untuk melihat apakah kesalahan pengganggu mempunyai varians yang sama atau tidak. Dalam penelitian ini, untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas dalam model digunakan uji Park.

Tabel 5.7

Pengujian Heteroskedastisitas dengan *Park Test*

<i>Park Test</i>		
Variabel	Probabilitas	Kesimpulan
DLM0	0,4852	Tidak Signifikan
DLGDPR	0,5746	Tidak Signifikan
BLM0	0,2021	Tidak Signifikan
BLGDPR	0,3779	Tidak Signifikan
ECT	0,3136	Tidak Signifikan

Sumber: Data Penelitian yang Diolah dengan Program Eviews 3.0, 2005

Berdasarkan tabel 5.7 di atas, terlihat bahwa variabel *independen* tidak signifikan mempengaruhi variabel *dependen* pada $\alpha = 5 \%$, ini berarti tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model.

5.3.3. Multikolinearitas

Multikolinearitas merupakan suatu keadaan di mana satu atau lebih variabel bebas terdapat korelasi dengan variabel bebas lainnya, atau dengan kata lain suatu variabel bebas merupakan fungsi linear dari variabel bebas lainnya. Dalam penelitian ini, untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas dalam model digunakan *Examination of Partial Correlation*.

Tabel 5.8
Pengujian Multikolinearitas dengan *Examination of Partial Correlation*

<i>Examination of Partial Correlation</i>		
R² Model Utama	Koefisien Korelasi Parsial	Kesimpulan
R ² (DLINF, DLM0, DLGDPR, BLM0, BLGDPR, ECT) = 0,521561	r (DLM0, DLGDPR, BLM0, BLGDPR, ECT) = 0,450838	Tidak terjadi Multikolinearitas
	r (DLGDPR, DLM0, BLM0, BLGDPR, ECT) = 0,640241	Terjadi Multikolinearitas
	r (BLM0, DLM0, DLGDPR, BLGDPR, ECT) = 0,925456	Terjadi Multikolinearitas
	r (BLGDPR, DLM0, DLGDPR, BLM0, ECT) = 0,811819	Terjadi Multikolinearitas
	r (ECT, DLM0, DLGDPR, BLM0, DLGDPR) = 0,841379	Terjadi Multikolinearitas

Sumber: Data Penelitian yang Diolah dengan Program Eviews 3.0, 2005

Berdasarkan tabel 5.8, R² model utama lebih besar daripada koefisien korelasi parsial, ini berarti terdapat multikolinearitas dalam model.

Menurut Gunawan Sumodiningrat (1994), masalah multikolinearitas bisa timbul karena:

1. Adanya sifat-sifat yang terkandung dalam kebanyakan variabel-variabel ekonomi berubah bersama-sama sepanjang waktu. Besaran-besaran ekonomi dipengaruhi oleh faktor-faktor yang sama. Oleh karena itu, dalam data *time series*, pertumbuhan dan faktor-faktor *trend* waktu merupakan penyebab utama adanya multikolinearitas.
2. Penggunaan nilai kelambanan (*lagged value*) dari variabel-variabel bebas tertentu dalam model regresi atau model empiris. Dapat dinyatakan bahwa bahwa pada umumnya multikolinearitas terjadi dalam model-model empiris yang menggunakan model *distribution lag*.

5.4. Uji Statistik

Pengujian statistik ini meliputi uji kebaikan suai (*Goodness of fit*), uji F dan uji t.

5.4.1. Uji Kebaikan Suai (*Goodness of Fit*)

Pengujian kebaikan suai dari persamaan regresi yaitu mengukur proporsi atau persentase variasi total dalam variabel bebas yang dijelaskan oleh variabel bebas.

Berdasarkan nilai *Adjusted R-squared* sebesar 0,521561, maka bisa dijelaskan bahwa ketepatan variabel uang primer (LM0) dan Produk Domestik Bruto Riil (LGDP) menerangkan variasi perubahan laju inflasi sebesar 52,15 %, sedangkan sisanya sebesar 47,85 % dijelaskan faktor lain di luar model tersebut.

5.4.2. Uji F

Uji F adalah pengujian untuk melihat apakah variabel bebas yang dianalisis secara bersama-sama atau serempak berpengaruh terhadap variabel tidak bebas.

Secara keseluruhan variabel uang primer (LM0) dan Produk Domestik Bruto Riil (LGDP) mempunyai *P-value* sebesar 0,002661 yang lebih kecil dari $\alpha = 1\%$. Dengan demikian H_0 ditolak. Berarti variabel uang primer (LM0) dan Produk Domestik Bruto Riil (LGDP) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel laju inflasi (LINF).

5.4.3. Uji t

Uji t adalah pengujian secara parsial untuk melihat apakah masing-masing variabel bebas berpengaruh terhadap variabel tidak bebas.

Dalam jangka pendek, koefisien regresi variabel uang primer (LM0) mempunyai *P-value* sebesar 0,7535 yang lebih besar dari $\alpha = 10\%$. Dengan demikian H_0 diterima. Berarti variabel uang primer (LM0) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel laju inflasi (LINF).

Dalam jangka pendek, koefisien regresi variabel uang primer pada kuartal

sebelumnya mempunyai *P-value* sebesar 0,0005 yang lebih kecil dari $\alpha = 1\%$. Dengan demikian H_0 ditolak. Berarti variabel uang primer pada kuartal sebelumnya berpengaruh signifikan terhadap variabel laju inflasi (LINF).

Dalam Jangka panjang, variabel uang primer (LM0) mempunyai nilai *t* hitung sebesar 0,426685 yang lebih kecil dari *t* tabel sebesar 2,069. Dengan demikian H_0 diterima. Berarti dalam jangka panjang, variabel uang primer (LM0) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel laju inflasi (LINF).

Dalam jangka pendek, koefisien regresi variabel Produk Domestik Bruto Riil (LGDPR) mempunyai *P-value* sebesar 0,0583 yang lebih kecil dari $\alpha = 6\%$. Dengan demikian H_0 ditolak. Berarti variabel Produk Domestik Bruto Riil (LGDPR) berpengaruh signifikan terhadap variabel laju inflasi (LINF).

Dalam jangka pendek, koefisien regresi variabel Produk Domestik Bruto Riil pada kuartal sebelumnya mempunyai *P-value* sebesar 0,1915 yang lebih besar dari $\alpha = 10\%$. Dengan demikian H_0 diterima. Berarti variabel Produk Domestik Bruto Riil pada kuartal sebelumnya tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel laju inflasi (LINF).

Dalam Jangka panjang, variabel Produk Domestik Bruto Riil (LGDPR) mempunyai nilai *t* hitung sebesar 4,3511087 yang lebih besar dari *t* tabel sebesar 2,069. Dengan demikian H_0 ditolak. Berarti dalam jangka panjang, variabel Produk Domestik Bruto Riil (LGDPR) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel laju inflasi (LINF).

Penjelasan yang bisa diberikan dari hasil di atas adalah sebagai berikut:

1. Dalam jangka pendek, uang primer tidak berpengaruh signifikan terhadap laju inflasi. Hasil ini tidak sesuai dengan teori kuantitas uang (Klasik), tetapi bisa dijelaskan oleh teori Keynes. Keynes berpendapat bahwa penambahan dalam uang beredar dapat menaikkan harga-harga, tetapi kenaikan uang beredar tidak selalu sebanding dengan

kenaikan dalam uang beredar. Kenaikan dalam uang beredar tidak selalu menimbulkan perubahan terhadap harga-harga. Didalam keadaan di mana perekonomian menghadapi masalah pengangguran yang cukup buruk, penambahan dalam uang beredar tidak akan mempengaruhi harga-harga.

2. Dalam jangka pendek, uang primer pada kuartal sebelumnya berpengaruh negatif dan signifikan terhadap laju inflasi. Apabila uang primer pada kuartal sebelumnya naik 1 % maka laju inflasi akan turun sebesar 0,019267%. Hasil ini sesuai dengan penelitian Umi Julaihah dan Insukindro (2004) yang menggunakan analisis VAR. Adanya pengaruh yang signifikan antara uang primer pada kuartal sebelumnya dengan laju inflasi membuktikan bahwa terdapat *time-lag* pada kebijakan moneter.
3. Dalam jangka panjang, uang primer tidak berpengaruh signifikan terhadap laju inflasi. Hasil ini tidak sesuai dengan teori kuantitas uang (Klasik), tetapi bisa dijelaskan oleh teori Keynes. Hasil ini juga sesuai dengan penelitian Erwin Haryono dkk (2000) yang menggunakan uji *Hsiao-Granger Causalit*, di mana hasilnya tidak seluruhnya mendukung hipotesis tentang mekanisme transmisi dari kebijakan moneter berdasarkan *quantity approach*. Sementara, dengan menggunakan *cointegration test*, hasilnya membuktikan bahwa hubungan jangka panjang antara M0, M1 dan M2 tidak stabil sehingga akan mengurangi efektifitas kebijakan moneter yang menggunakan *quantity approach*.
4. Dalam jangka pendek, Produk Domestik Bruto Riil (LGDPR) mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap laju inflasi. Apabila Produk Domestik Bruto Riil naik 1 % maka laju inflasi akan naik sebesar 0,675749 %.
5. Dalam jangka pendek, Produk Domestik Bruto Riil pada kuartal sebelumnya tidak berpengaruh signifikan terhadap laju inflasi.

6. Dalam jangka panjang, Produk Domestik Bruto Riil (LGDP) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap laju inflasi. Apabila Produk Domestik Bruto Riil naik 1 % maka laju inflasi akan naik sebesar 1,6987642 %. Hasil ini

Hasil ini bertentangan dengan teori kuantitas uang. Hal ini bisa dijelaskan dengan menggunakan teori sisi penawaran (*supply-side theory*), di mana teori ini menekankan pada terjadinya pergeseran kurva *aggregat supply* sebagai penyebab utama inflasi. Keadaan ini timbul biasanya dimulai dengan penurunan dalam penawaran total (*aggregat supply*), sebagai akibat kenaikan biaya produksi. Kenaikan produksi pada gilirannya akan menaikkan harga dan turunnyanya produksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Achyar Ilyas. 1999. Menuju Kestabilan Nilai Rupiah Melalui Independensi, Akuntabilitas dan Transparansi. **Makalah Diskusi Panel Kemandirian Bank Indonesia Pasca UU NO. 23 Tahun 1999**. Jakarta
- Agustinus Suryantoro dan Nugroho SBM. 2000. Studi Tentang Inflasi di Indonesia (Tinjauan teoritis dan Studi Empirik). **Media Ekonomi & Bisnis**. Vol XII No. 2.
- Anton Hermanto Gunawan. 1991. **Anggaran Pemerintah dan Inflasi**. Jakarta: Gramedia
- Anwar Nasution. 2001. Kerangka Kerja Kebijakan Moneter bank Indonesia Pasca Krisis. **Makalah Seminar Nasional di FE UNDIP Dalam Rangka Dies Natalis ke 44**. Semarang.
- Badan Pusat Statistik. Beberapa edisi. **Laporan Perekonomian Indonesia**.
- Bank Indonesia. Beberapa edisi. **Laporan Tahunan Bank Indonesia**.
- . Beberapa edisi. **Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia**.
- Boediono. 1985. **Ekonomi Moneter**. Ed. 3. Yogyakarta: BPFE.
- Dernburg, Thomas F. 1994. **Makro Ekonomi: Teori, Analisis dan Kebijakan**. Ed. 7. Jakarta: Erlangga
- Didik J Rachbini, dkk. 2000. **Bank Indonesia Menuju Independensi Bank Sentral**. Jakarta: PT. Mardi Mulyo.
- Diddy Laksmono R dkk. 2000. Suku Bunga Sebagai Salah Satu Indikator Ekspektasi Inflasi. **Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan**. Vol.2 No. 4, Maret
- Doddy Zulverdi dkk. 2000. Operasi Pengendalian Moneter Yang Berbasis Suku Bunga dalam Mencapai Sasaran Inflasi. **Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan**. Desember
- Dumairy. 1987. Kausalitas Antara Uang Beredar dan Inflasi. **Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia**. No. 2.
- Erwin Haryono dkk. 2000. Mekanisme pengendalian Moneter Dengan Inflasi Sebagai Sasaran Tunggal. **Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan**. Vol. 2 No. 4, Maret 2000.
- Firmansyah. 2001. **Modul Pelatihan Praktis Ekonometrika Aplikasi Econometric VIEWS 3.0**. Semarang: LSKE FE Undip.

- Gujarati, DN. 1995. **Basic Econometrics**. 3th Ed. McGraw-Hill.
- Gujarati, DN. 2003. **Basic Econometric**. 4th Ed. McGraw-Hill.
- Guritno Mangkoesobroto dan Algifari. 1998. Ed. 3. **Teori Ekonomi Makro**. Yogyakarta: Bagian Penerbit STIE YKPN.
- Halim Alamsyah dan Abdul Kadir Masyhuri. 1999. **Inflation Targeting Sebagai Kerangka Kerja Alternatif Bagi Kebijakan Moneter**. *Occasional Paper*. Bank Indonesia. Jakarta.
- Imam Ghozali. 2001. **Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS**. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Insukindro. 1991. Regresi Linier Lancung dalam Analisis Ekonomi: Suatu Tinjauan dengan Studi Kasus di Indonesia. **Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia**. Vol. VI, No. 6.
- Insukindro. 1992. Pembentukan Model dalam Penelitian Ekonomi. **Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia**. Vol. VII, No. 1.
- . 1998. Sindrom R^2 dalam Analisis Regresi Linier Runtun Waktu, **Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia**. Vol. IV, No. 13.
- . 1999. Pemilihan Model Ekonomi Empirik dengan Pendekatan Koreksi Kesalahan. **Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia**. Vol. XIV, No. 1.
- Iswardono SP. 1993. **Ekonomi Uang dan Bank**. Yogyakarta: BPFE.
- Mankiw, Gregory N. 2000. **Teori Makro Ekonomi**. Ed.4. Jakarta: Erlangga
- Mishkin, Frederics. 2001. **The Economics of Money, Banking and Financial Markets**. 6th. ed. Addison Wesley Longman.
- Muana Nanga. 2001. **Makroekonomi: Teori, Masalah dan Kebijakan**. Rajawali Pers: Jakarta
- Nopirin. 1992. **Ekonomi Moneter Buku I**. Yogyakarta: BPFE.
- . 2000. **Ekonomi Moneter Buku II**. Yogyakarta: BPFE.
- Perry Warjiyo. 2004. **Bank Indonesia Bank Sentral Republik Indonesia: Sebuah Pengantar**. Jakarta: Pusat Pendidikan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia.
- dan Solikin. 2003. **Kebijakan Moneter di Indonesia**. Seri Kebanksentralan No. 6. Jakarta: Pusat Pendidikan Studi Kebanksentralan (PPSK). Bank

Indonesia.

Perry Warjiyo. 2004. **Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter di Indonesia**. Seri Kebanksentralan No. 11. Jakarta: Pusat Pendidikan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia.

Sadono Sukirno. 2000. **Makroekonomi Modern: Perkembangan Pemikiran Dari Klasik Hingga Keynesian Baru**. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

-----, 2002 . **Pengantar Teori Makroekonomi**. Ed. 2. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sawaldjo Puspoprano. 2004. **Keuangan Perbankan dan Pasar Keuangan: Konsep Teori dan Realita**. Jakarta: LP3ES.

Syahril Sabirin. 2002. Kebijakan Moneter Bank Indonesia Dalam Mendukung Proses Pemulihan Ekonomi. **Makalah Sebagai Bahan Kuliah Umum**. Undip. Semarang.

Tedy Herlambang dkk. 2001. **Ekonomi Makro: Teori, Analisis dan Kebijakan**. Jakarta: Gramedia.

Umi Julaihah dan Insukindro. 2004. Analisis Dampak Kebijakan Moneter terhadap Variabel Makroekonomi di Indonesia Tahun 1983.1 – 2003.2. **Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan**. Vol.7, No.2, September 2004.